



LAPORAN HASIL PENELITIAN **“SURVEI KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN** **KEMDIKNAS 2011”**



Desember 2011

Dipersiapkan Untuk
Pusat Informasi dan Humas (PIH)
Kementerian Pendidikan Nasional

DAFTAR ISI

- 1. Ringkasan Eksekutif**
- 2. Pendahuluan**
- 3. Bagian 1 – Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdiknas Tingkat Nasional**
- 4. Bagian 2 – Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdiknas Kategori Primer**
- 5. Bagian 3 – Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdiknas Kategori Sekunder**
- 6. Kesimpulan dan Saran**
- 7. Lampiran**
 - **Metode Penelitian & Penghitungan Indeks Kepuasan**
 - **Komposisi Responden.**

Ringkasan Eksekutif (1)

- Tingkat kepuasan dari para pemangku kepentingan Kemdiknas berada pada posisi “Biasa” (50,01 – 75,00), yang berarti program dan kinerja Kemdiknas dinilai masih belum optimal memberikan dampak kepuasan yang berarti.
- Terdapat perbedaan penilaian Stakeholder Primer dan Sekunder dalam beberapa aspek penilaian. Parameter dari *Stakeholder* Primer yang paling berpengaruh adalah Kurikulum dan Kualitas Lembaga Kependidikan PTK (berada di atas rata-rata), lalu Sarana & Prasarana Sekolah (di bawah rata-rata). Sementara parameter dari *Stakeholder* Sekunder yang paling berpengaruh adalah Anggaran Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (berada di bawah rata-rata), lalu Sarana & Prasarana Sekolah (di atas rata-rata).
- Pemangku kepentingan kategori Primer cenderung mencermati isu yang terkait dengan kualitas program pendidikan (kurikulum, lembaga kependidikan, dsb.) dan sarana & prasarana sekolah. Sementara pemangku kepentingan kategori Sekunder cenderung mencermati isu yang terkait politis seperti anggaran pendidikan dan reformasi birokrasi di Kemdiknas.

Ringkasan Eksekutif (2)

- Kecukupan jumlah sekolah PAUD berada pada posisi terendah kepuasan stakeholder primer. Lalu kurikulum PAUD dinilai telah cukup memuaskan stakeholder primer dalam hal mendidik moral & akhlak dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kualitas pendidik dan lembaga kependidikan PAUD berada pada posisi kepuasan terendah. Terakhir, kesejahteraan pendidik PAUD berada pada posisi kepuasan terendah.
- Sarana dan prasarana SMK berada pada posisi tertinggi kepuasan stakeholder primer. Lalu kurikulum SMK dinilai telah cukup memuaskan stakeholder primer khususnya dalam hal orientasi kurikulum ke dunia kerja. Kualitas pendidik dan lembaga kependidikan SMK berada pada posisi kepuasan tertinggi. Terakhir, kesejahteraan pendidik PAUD berada pada posisi kepuasan cukup tinggi.

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdiknas ini dilaksanakan di 33 provinsi (urban/rural) mencakup seluruh kategori dan kelompok pemangku kepentingan dengan total sebanyak 7.412 responden.

Tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Mendapatkan evaluasi tingkat kepuasan dari para pemangku kepentingan terhadap program kerja dan kebijakan Kemdiknas secara nasional;
2. Mendapatkan acuan dasar (*baseline*) terhadap penerimaan para pemangku kepentingan dalam hal penerimaan para pemangku kepentingan atas program kerja dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional; dan
3. Mendapatkan rekomendasi program peningkatan/perbaikan kualitas program kerja dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional secara nasional, serta untuk peningkatan persepsi positif para pemangku kepentingan.

Metode Pengukuran Tingkat Kepuasan

- Tingkat Kepuasan diukur dengan menggunakan skala Likert (1 – 5)
 - 1 = Sangat Tidak Puas;
 - 2 = Kurang Puas;
 - 3 = Antara Puas dan Tidak Puas;
 - 4 = Cukup Puas;
 - 5 = Sangat Puas
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diukur berdasarkan skor rata-rata (*mean score*) jawaban dari topik pertanyaan yang menjadi parameter. Antar kategori responden dan parameter diasumsikan memiliki bobot yang sama.
- Untuk mempermudah analisa tingkat kepuasan, di dalam analisa indeks skala Likert dikonversi dalam skala 0 – 100, dengan penjelasan sebagai berikut.

Skor Indeks	Makna Indeks Kepuasan
0 – 25,00	Tidak Memuaskan
25,01 – 50,00	Kurang Memuaskan
50,01 – 75,00	Biasa
75,01 – 90,00	Cukup Memuaskan
90,01 – 100	Istimewa (Sangat Memuaskan)

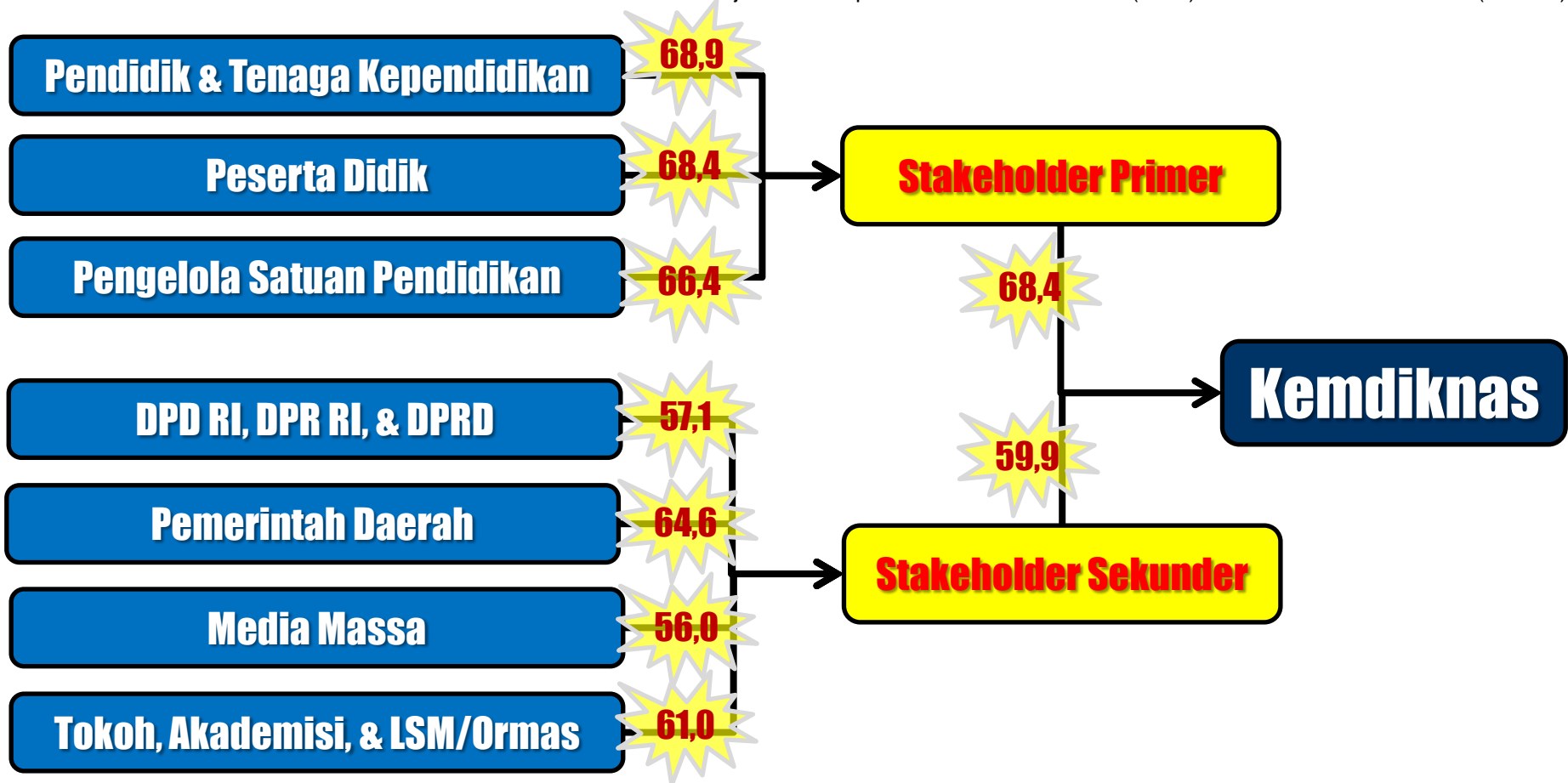
BAGIAN 1

KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEMDIKNAS TINGKAT NASIONAL

Tingkat Kepuasan Total *Stakeholder* Kemdiknas

Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden

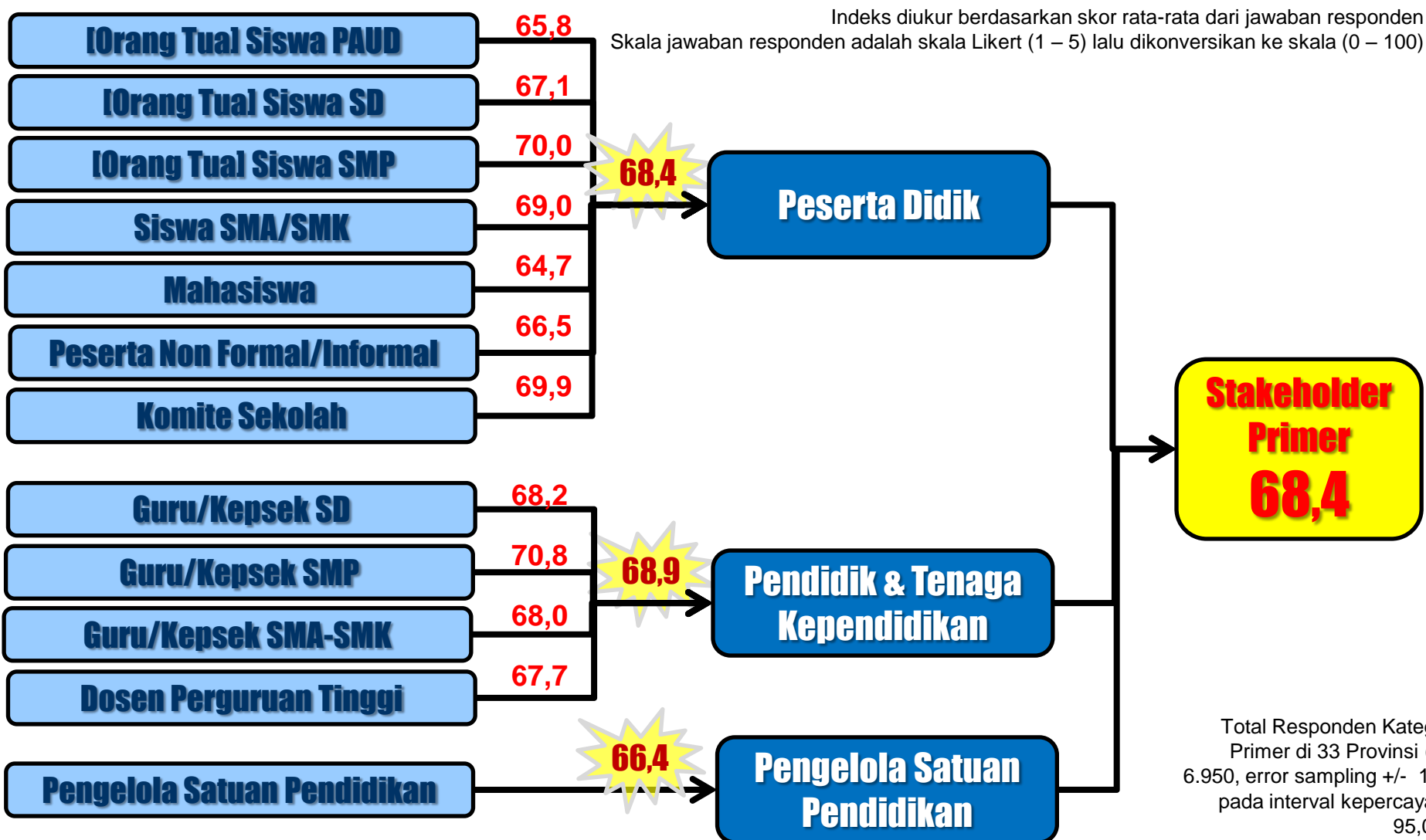
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100)



Total Responden di 33 Provinsi (N= 7.412, *error sampling* +/- 1,14 pada interval kepercayaan 95,0%)

Komposisi: Stakeholder Primer (N= 6.950) & Stakeholder Sekunder (N= 462)

Tingkat Kepuasan *Stakeholder* Primer Kemdiknas

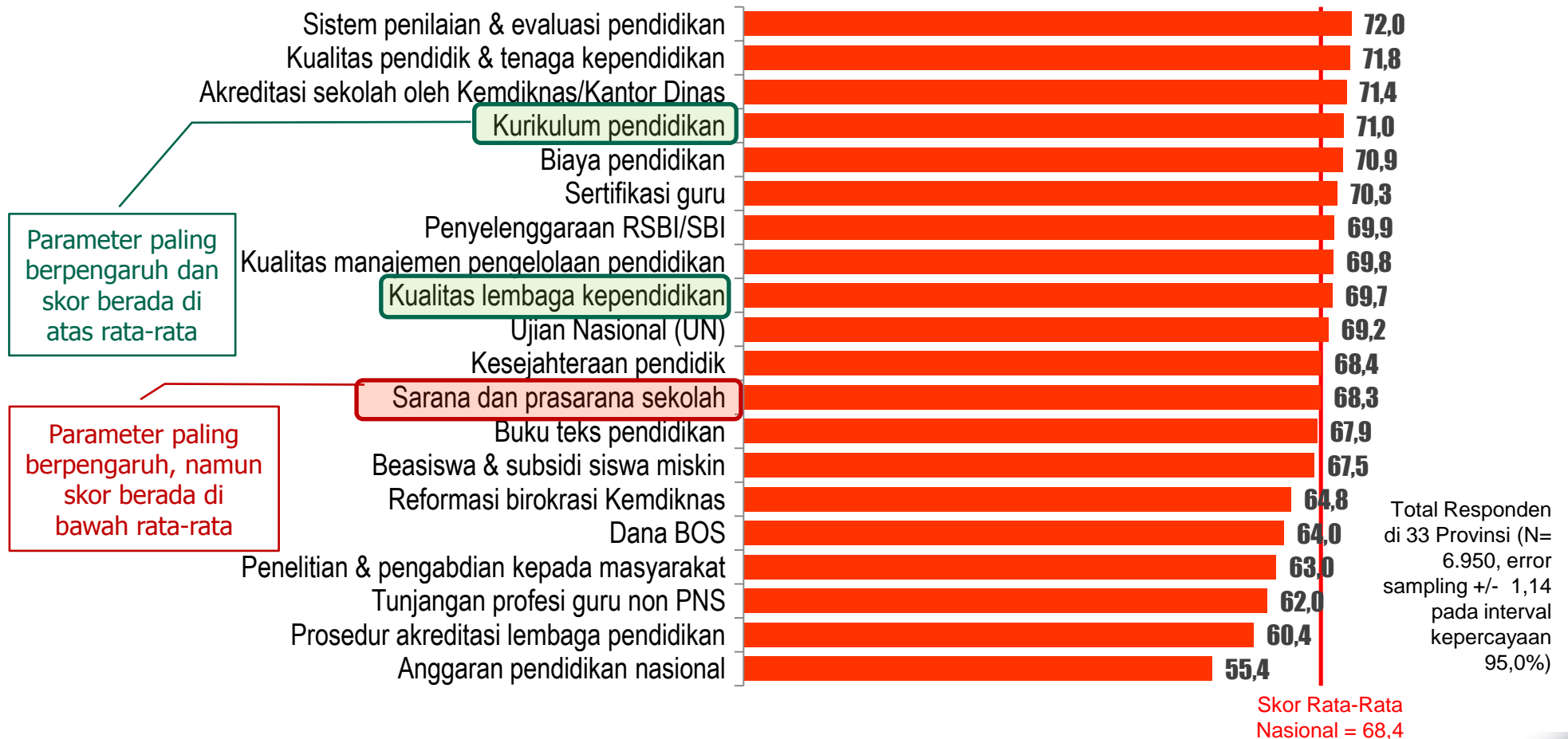


BERDASARKAN ASPEK PENILAIAN (PARAMETER)

Tingkat Kepuasan *Stakeholder* Primer Kemdiknas

Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100)

Tingkat Kepuasan *Stakeholder* Primer

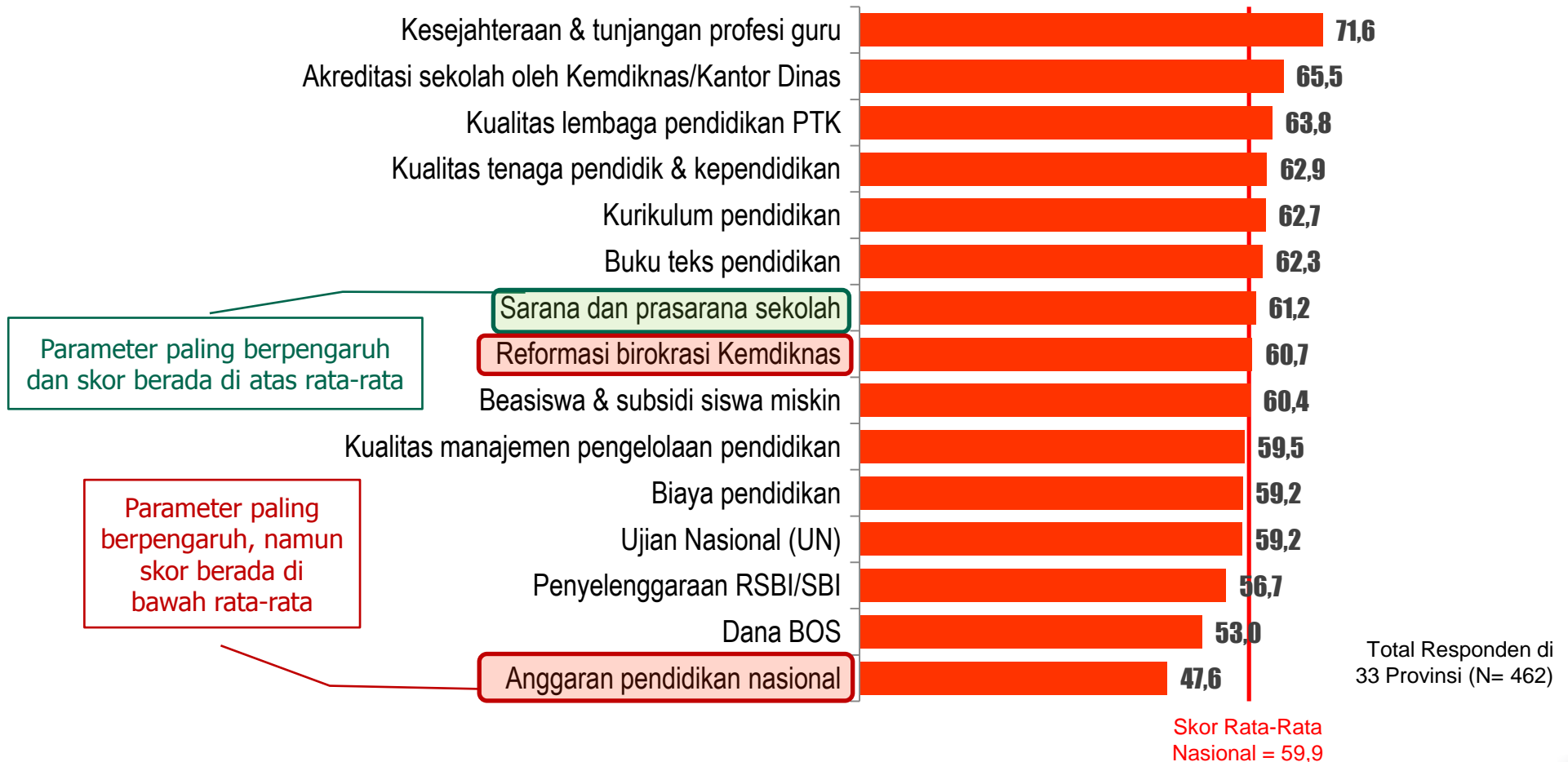


BERDASARKAN ASPEK PENILAIAN (PARAMETER)

Tingkat Kepuasan *Stakeholder* Sekunder Kemdiknas

Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100)

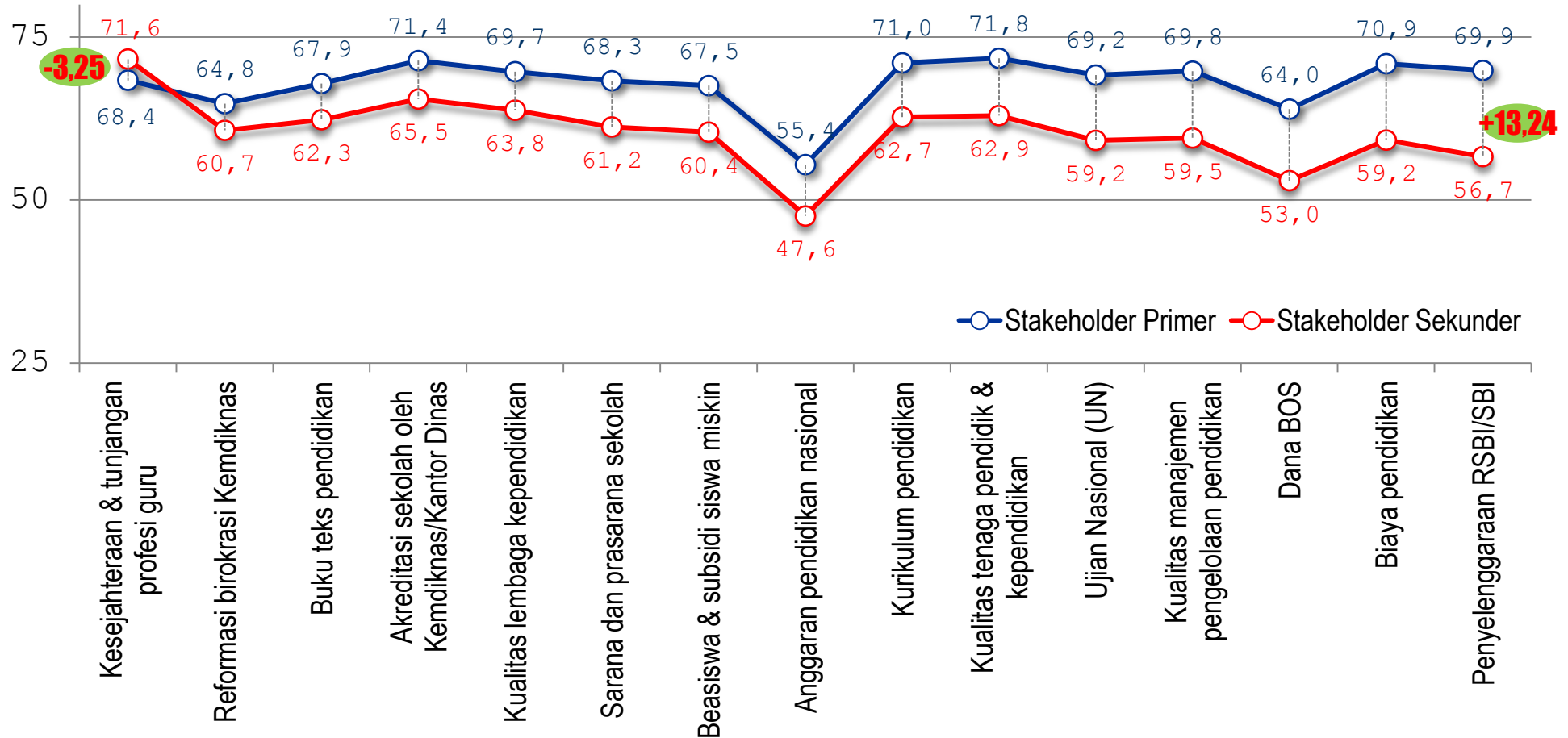
Tingkat Kepuasan *Stakeholder* Sekunder



BERDASARKAN ASPEK PENILAIAN (PARAMETER)

Perbandingan *Stakeholder* Primer dan Sekunder

Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100)



PERBANDINGAN STAKEHOLDER PRIMER DAN SEKUNDER

Parameter Paling Berpengaruh

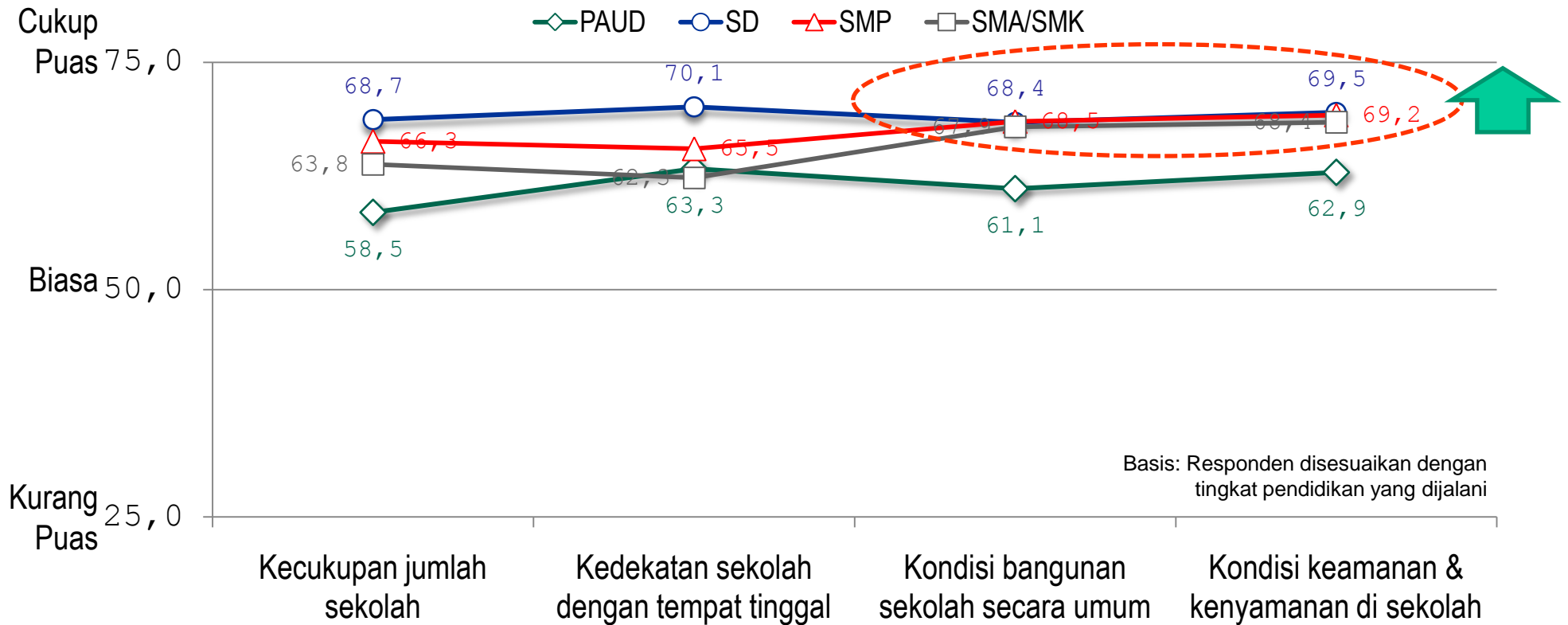


BAGIAN 2

KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEMDIKNAS KATEGORI PRIMER

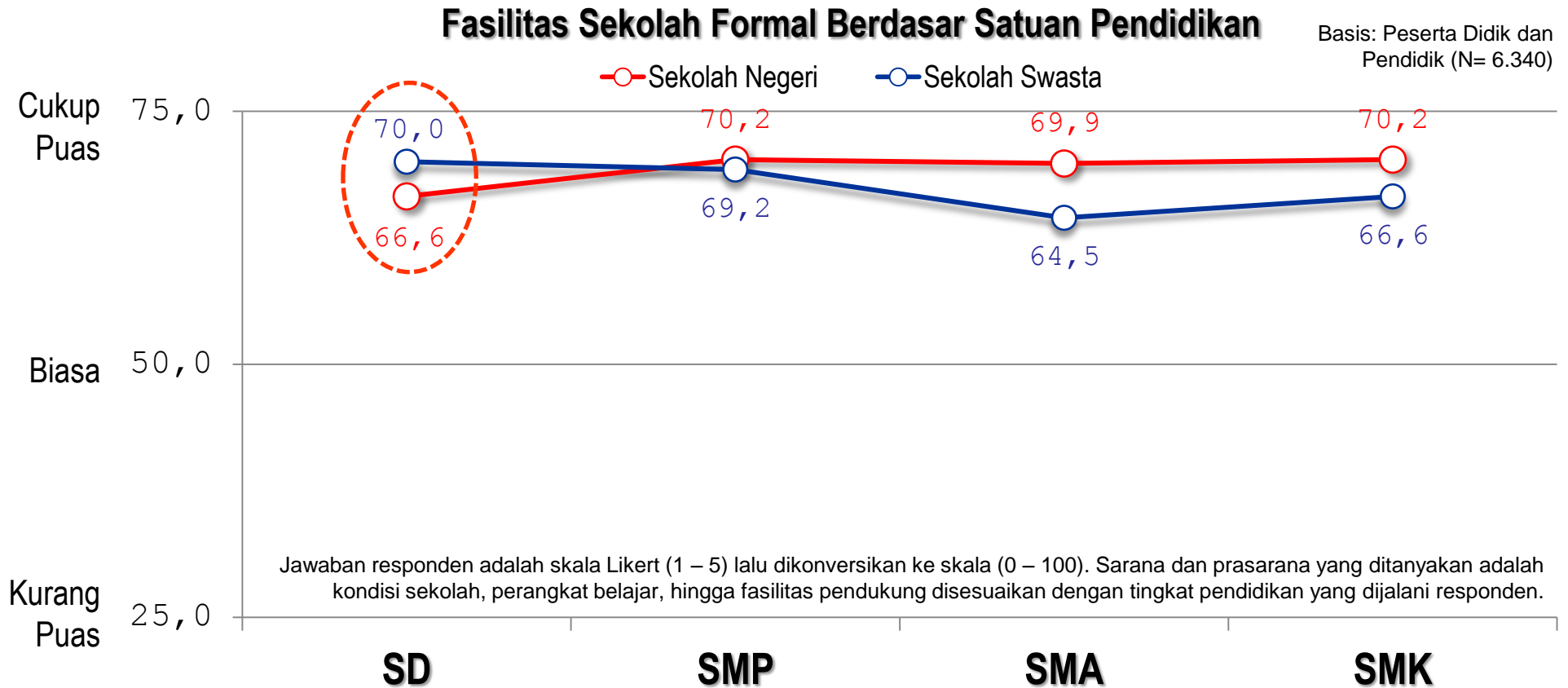
Sarana dan Prasarana (1)

Kondisi Umum Sekolah Formal Berdasar Satuan Pendidikan



- Kondisi bangunan dan kenyamanan sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK secara umum dinilai cukup baik mendekati harapan *Stakeholder* Primer. Namun tetap perlu mencapai skor minimal kepuasan stakeholder, yakni 75,0.

Sarana dan Prasarana (2)



- Tingkat kepuasan terhadap fasilitas sarana sekolah yang diterima *Stakeholder* Primer, khususnya yang berada di sekolah negeri relatif lebih puas dibanding sekolah swasta, kecuali di SD.

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Kurikulum Pendidikan

No	Aspek Kurikulum Pendidikan	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	PT	NFI	Total
1.	Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan/kemampuan siswa	72,7	70,6	72,7	70,6	72,8	70,8	70,1	71,5
2.	Kurikulum yang mendidik moral dan akhlak siswa	73,7	71,5	73,8	70,7	73,6	68,0	68,3	71,4
3.	Kurikulum yang meningkatkan kreatifitas siswa	71,8	68,9	72,3	69,5	73,6	68,9	69,3	70,6
4.	Kurikulum yang berorientasi dunia kerja	-	-	-	-	76,5	69,5	62,5	69,5
5.	Kurikulum yang membangun karakter bangsa siswa	70,7	69,6	72,2	68,9	71,7	67,0	63,9	69,1
6.	Kurikulum yang mengoptimalkan Teknologi Informasi (TIK)	-	59,3	66,5	67,0	72,1	68,0	58,3	65,2
7.	Kurikulum yang berstandar internasional	-	-	65,0	60,1	64,2	60,6	62,2	62,4
	Rata-rata (Total)	72,2	68,0	70,4	67,8	72,1	67,5	65,0	

- Kurikulum PAUD dan SMK dinilai pemangku kepentingan lebih memuaskan dibandingkan satuan pendidikan yang lain, SMK unggul khususnya dalam muatan kurikulum berorientasi kerja.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Basis: Responden disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang dijalani

Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Aspek Kualitas PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	PT	NFI	Total
1.	Kualitas pimpinan lembaga dalam mengelola pendidikan sekolah	71,5	71,3	75,0	72,2	75,3	71,2	70,3	72,6
2.	Kualitas pendidik dalam pengajaran	68,0	69,4	72,8	71,0	72,0	71,6	72,1	70,1
3.	Jumlah pendidik yang berlatar pendidikan sesuai atau bersertifikat	64,5	68,6	72,2	72,4	73,2	74,4	68,2	68,5
4.	Kecukupan jumlah pendidik bidang studi umum maupun khusus	63,0	69,0	72,5	71,4	73,3	67,9	67,0	68,2
5.	Jumlah tenaga pendukung sekolah (staf TU, admin, dsb.)	61,8	67,0	71,5	69,2	71,7	70,1	64,1	66,8
		65,8	69,1	72,8	71,2	73,1	71,0	68,3	

- Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMK pun dinilai pemangku kepentingan lebih memuaskan dibandingkan satuan pendidikan yang lain, unggul khususnya dalam kualitas pimpinan lembaga (Kepsek) dalam mengelola sekolah.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Basis: Responden disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang dijalani

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Kualitas Lembaga Kependidikan PTK

No.	Aspek Lembaga Kependidikan	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	NFI	Total
1.	Jumlah lulusan Diploma/Sarjana kependidikan	63,4	70,2	72,6	70,2	73,3	66,9	69,4
2.	Kualitas lulusan Diploma/Sarjana kependidikan	65,2	68,4	71,2	69,7	72,4	67,0	69,0
3.	Kualitas lembaga pendidikan calon guru/ pendidik	64,9	67,6	70,3	67,5	70,5	64,8	67,6
4.	Kecukupan jumlah lembaga pendidikan untuk guru/pendidik	61,8	68,1	70,4	68,8	71,9	61,3	67,1
		63,8	68,6	71,1	69,1	72,0	65,0	

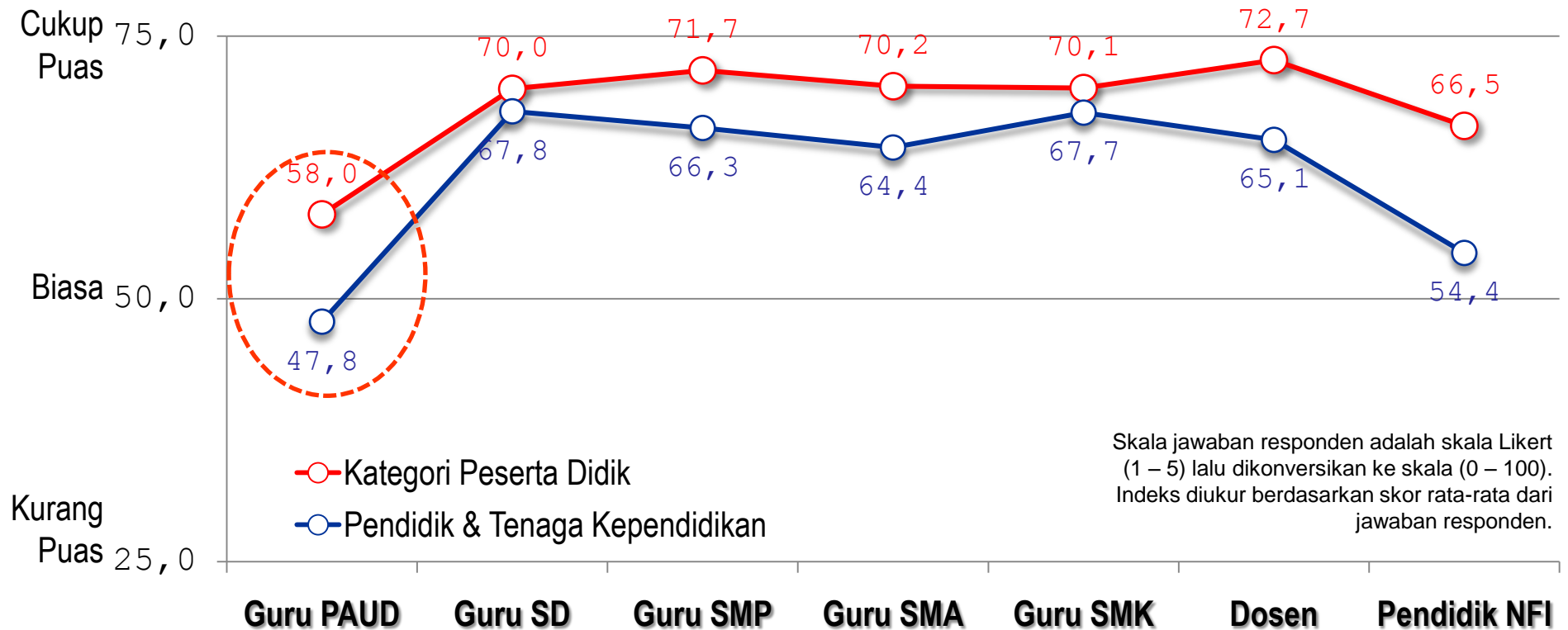
- Kualitas lembaga kependidikan bagi PTK sekolah SMK dinilai pemangku kepentingan lebih memuaskan dibandingkan kualitas lembaga kependidikan satuan pendidikan yang lain.
- Hal ini menunjukkan program kebijakan sekolah kejuruan diapresiasi positif dalam hal kurikulum, kualitas PTK, dan kualitas lembaga kependidikan PTK dibanding strata pendidikan yang lain.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Basis: Responden disesuaikan dengan
tingkat pendidikan yang dijalani

Kesejahteraan Pendidik

Kesejahteraan Pendidik Berdasar Satuan Pendidikan



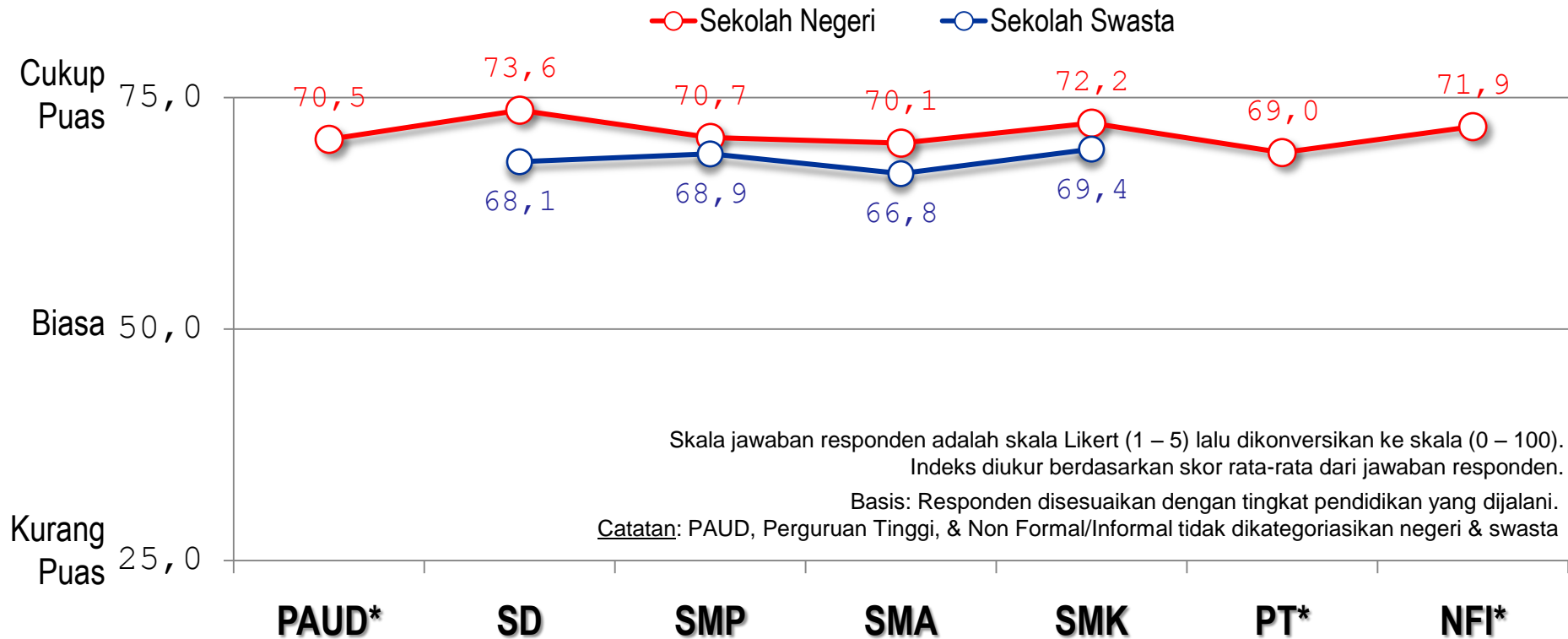
- Pemangku kepentingan menilai kesejahteraan guru PAUD kurang memuaskan dibandingkan para guru atau pendidik dari satuan pendidikan yang lain.

Basis: Responden disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang dijalani

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Biaya Pendidikan

Kepuasan Terhadap Biaya Pendidikan Berdasar Satuan Pendidikan

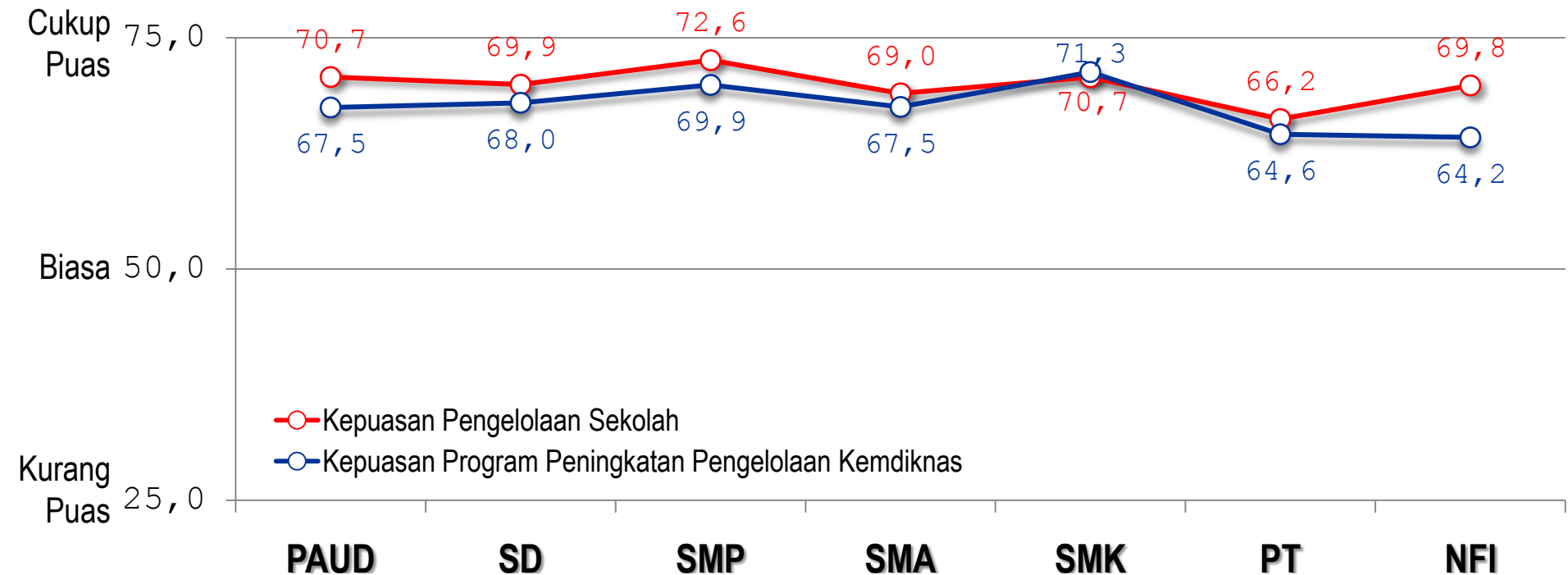


- Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan di sekolah negeri cenderung sama dalam menilai biaya pendidikan, yakni relatif baik mendekati harapan/kepuasan atau mendekati skor 75,0. Hanya kepuasan di sekolah swasta relatif lebih rendah.

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendidikan

Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendidikan



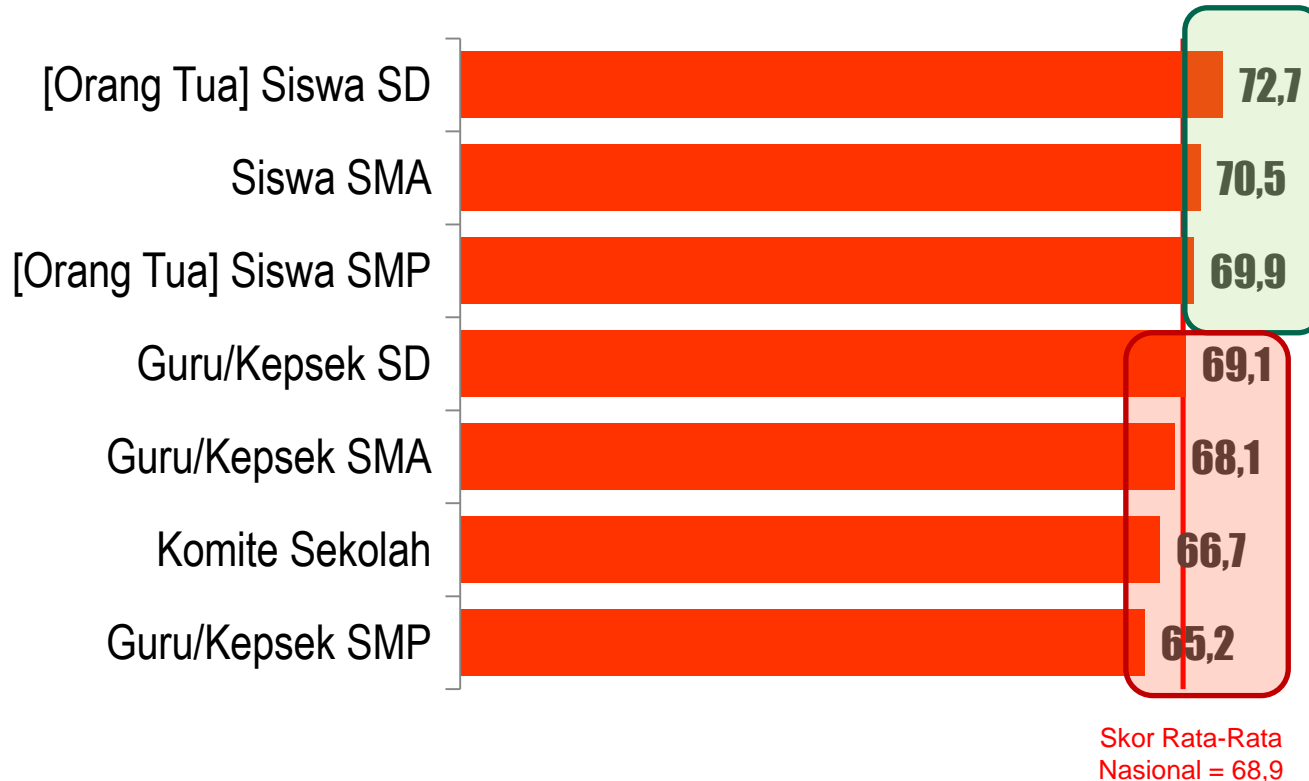
- Pendidik dan peserta didik menilai manajemen pengelolaan yang telah dilakukan internal itu cukup baik mendekati skor 75,0 (=PUAS), bahkan melebihi kepuasan terhadap program peningkatan pengelolaan pendidikan dari Kantor Dinas/Kemdiknas.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah pendidik dan peserta didik yang mengetahui pengelolaan manajemen di sekolahnya dan program peningkatan manajemen dari Kemdiknas/Kantor Dinas Pendidikan.

Penyelenggaraan Program RSBI/SBI

Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan RSBI/SBI

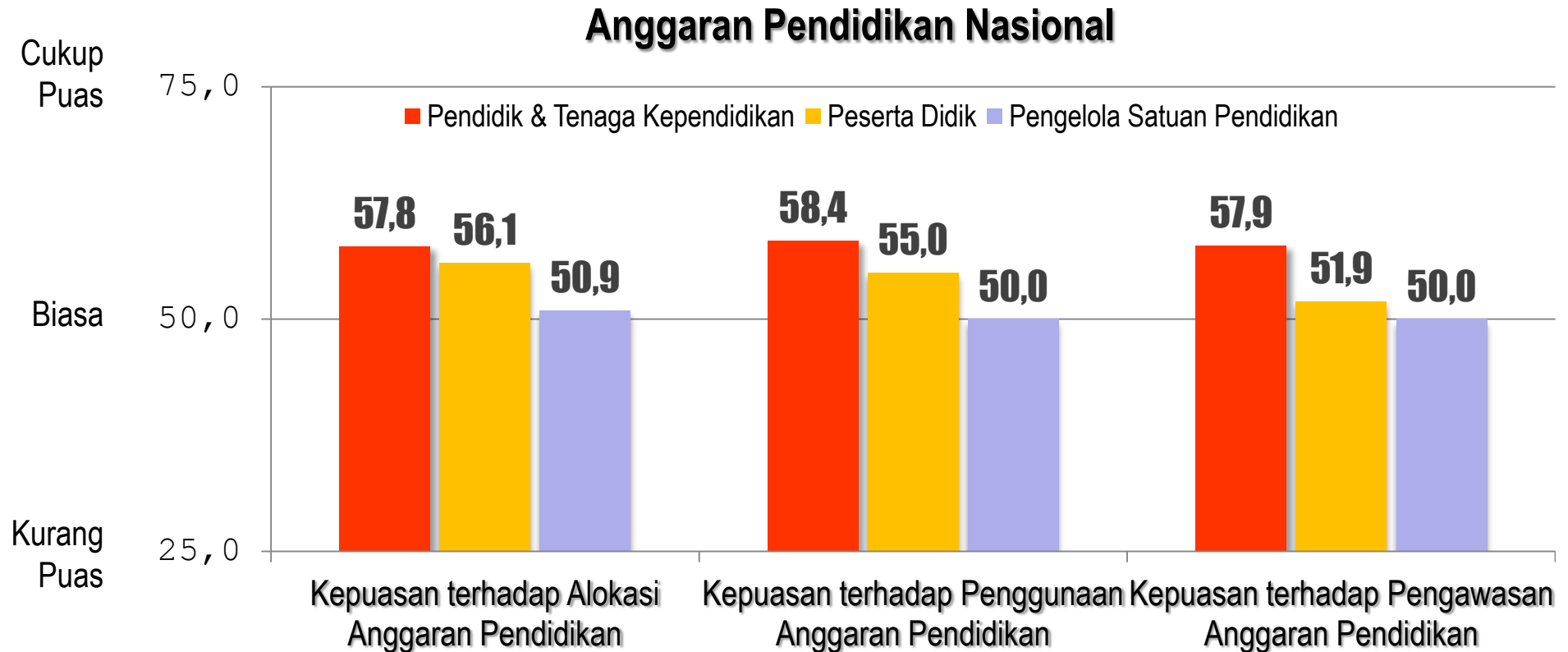


- Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI dari kelompok peserta didik lebih mengapresiasi (skor > rata-rata) dibanding pendidik.
- Siswa SD yang diwakili orang tua merupakan kelompok yang tertinggi menilai kepuasan terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI di sekolahnya.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan yang di sekolahnya terselenggara program RSBI/SBI.

Anggaran Pendidikan Nasional

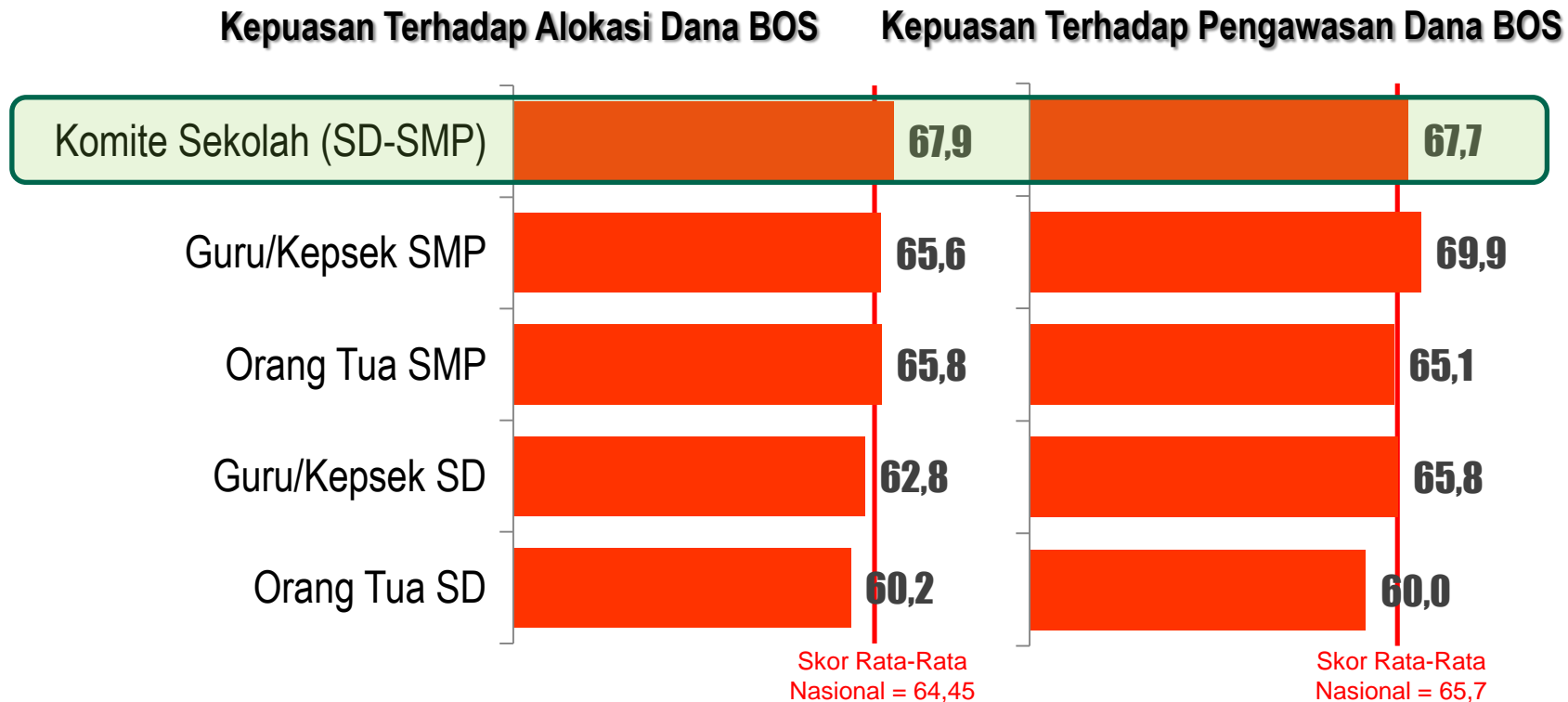


- Penilaian *stakeholder* primer terhadap anggaran pendidikan, baik dalam alokasi, penggunaan, dan pengawasan relatif dinilai “Biasa” atau masih belum memuaskan. Kepuasan pendidik lebih tinggi dibanding peserta didik dan pengelola.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah peserta didik, pendidik, dan pengelola satuan pendidikan yang mengetahui amanat UUD bahwa anggaran pendidikan nasional sebesar 20%.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



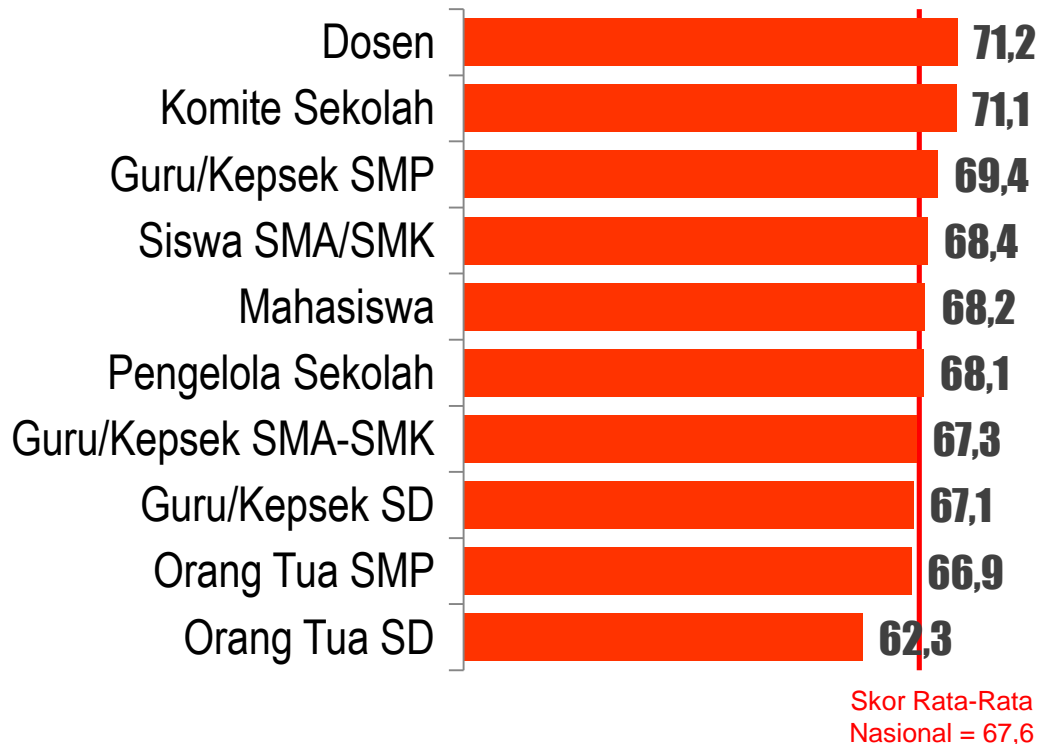
- Penilaian stakeholder primer terhadap alokasi dan pengawasan Dana BOS relatif dinilai “Biasa” atau masih belum memuaskan. Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa dan PTK berpotensi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap Dana BOS.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah peserta didik dan pendidik yang sekolahnya menerima Dana BOS.

Beasiswa dan Subsidi Siswa Miskin

Kepuasan Terhadap Beasiswa & Subsidi Siswa Miskin



- Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap beasiswa dan subsidi bagi siswa miskin di satuan pendidikan mereka sendiri diapresiasi positif terutama oleh dosen dan komite sekolah.
- Sementara tingkat kepuasan siswa SD dan SMP yang diwakili orang tuanya menilainya masih belum cukup memuaskan.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan yang mengetahui adanya beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi di sekolahnya

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Ketersediaan Buku Teks

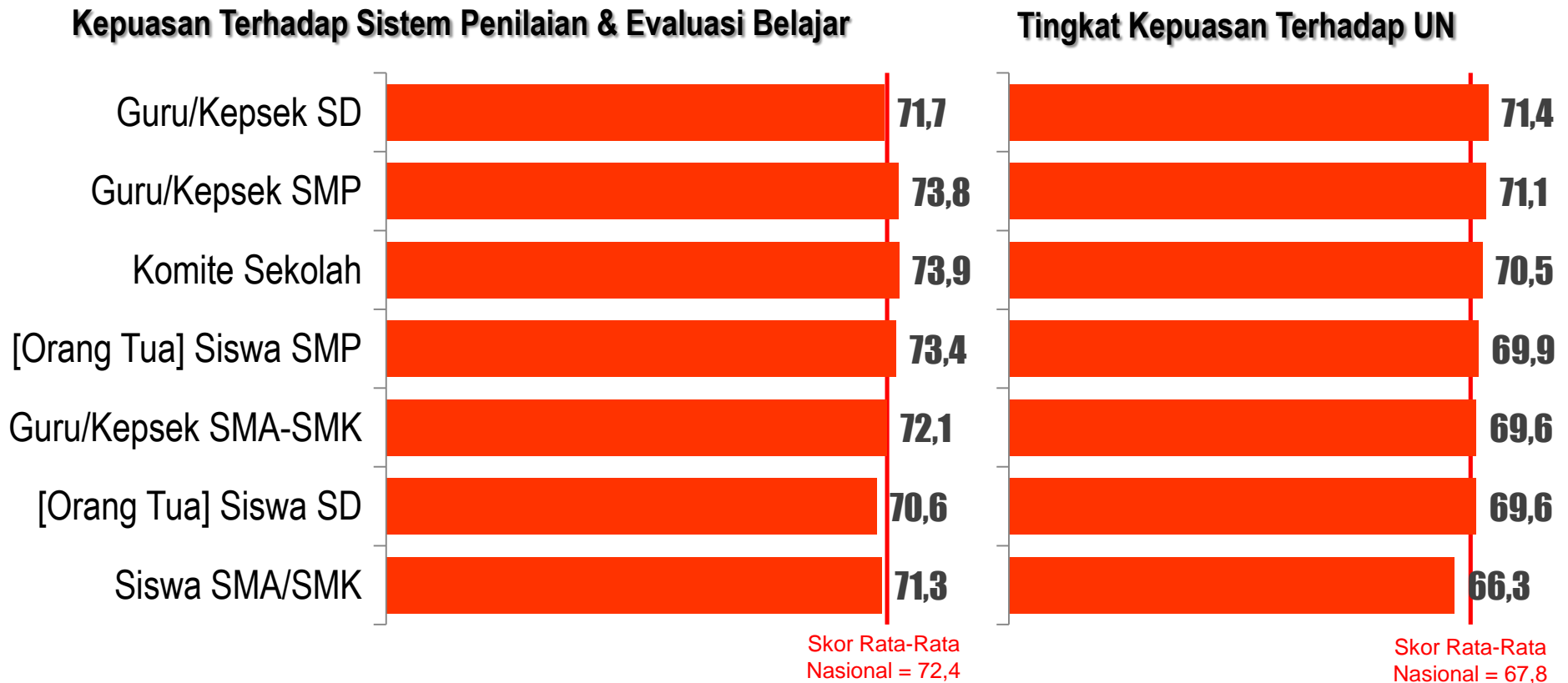
No.	Aspek Ketersediaan Buku Teks	SD	SMP	SMA	SMK	PT	NFI	Total
1.	Kesesuaian materi teks pelajaran dgn kurikulum yang diajarkan	70,1	73,0	71,4	72,2	68,3	67,8	70,5
2.	Kualitas buku teks pelajaran bagi siswa	69,3	71,8	69,5	71,3	69,3	66,0	69,5
3.	Ketersediaan buku teks pelajaran di toko/di pasaran	68,2	71,7	69,3	67,6	67,1	60,7	67,4
4.	Bantuan Kemdiknas/Kantor Dinas Pendidikan dalam penyediaan buku teks pelajaran ke sekolah	62,4	66,5	63,0	64,3	59,2	58,0	62,3
5.	Buku teks dapat dipergunakan secara berulang (buku tahun ini dapat digunakan untuk tahun depan)	58,3	60,0	61,7	62,1	64,4	60,4	61,1
6.	Harga buku teks pelajaran yang terjangkau (cukup murah)	59,1	60,4	57,1	58,6	53,2	60,2	58,1
Rata-Rata Total		64,6	67,2	65,3	66,0	63,6	62,2	

- *Stakeholder* Primer masih mengeluhkan harga buku teks yang cukup mahal, ditandai kepuasan yang rendah dibanding aspek ketersediaan buku yang lain.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan yang mengetahui ketersediaan buku.

Sistem Penilaian/Evaluasi dan Ujian Nasional (UN)

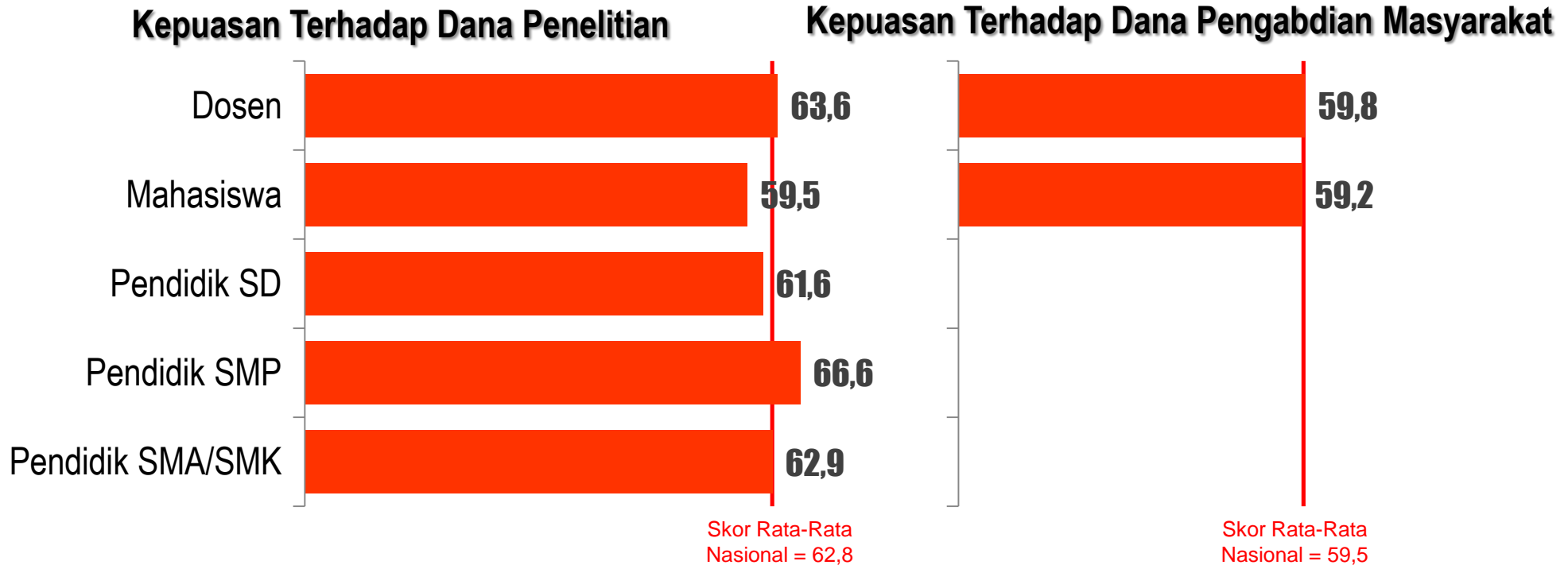


- Sistem penilaian/evaluasi belajar yang telah dijalankan oleh pihak pendidik selama ini dinilai lebih memuaskan dibanding ujian nasional (UN).

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah peserta didik dan pendidik yang mengetahui evaluasi belajar dan Ujian Nasional di sekolahnya.

Dana Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat



- Pendidik SMP dan SMA/SMK yang mengetahui dana penelitian untuk pembuatan karya ilmiah relatif cukup banyak yang mengapresiasi positif.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah Dosen, Mahasiswa, dan Pendidik SD-SMA yang mengetahui dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Sertifikasi Guru

No.	Proses & Prosedur Sertifikasi Guru	Pendidik SD	Pendidik SMP	Pendidik SMA/SMK	Total
1.	Persyaratan guru yang dapat mengikuti sertifikasi	65,8	67,8	63,8	65,8
2.	Proses uji kompetensi dalam bentuk penyusunan portofolio	68,4	64,5	63,3	65,4
3.	Proses penyerahan dan verifikasi dokumen ke LPTK Penyelenggara	67,6	69,3	63,2	66,7
4.	Proses penilaian oleh Asesor	66,1	70,0	67,6	67,9
5.	Penilaian kelulusan mendapat sertifikat Pendidik	72,6	73,4	69,7	71,9
6.	Proses perbaikan atau melengkapi portofolio jika belum lulus	71,4	68,8	67,7	69,3
7.	Kegiatan PLPG dan ujian ulang jika belum lulus	69,9	71,1	69,5	70,2
8.	Prosedur penerimaan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus	72,9	74,1	69,8	72,3
9.	Tunjangan fungsional setelah penerimaan Sertifikat	73,3	76,4	69,8	73,2
Rata-Rata Total		69,8	70,6	67,2	



Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah Pendidik SD-SMA yang mengetahui proses sertifikasi guru.

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

No.	Tunjangan Profesi Guru Non PNS	Pendidik SD	Pendidik SMP	Pendidik SMA	Pendidik SMK	Total
1.	Kepuasan terhadap persyaratan dan prosedur pengusulan guru bukan PNS untuk mendapatkan tunjangan profesi dari dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi	61,7	63,3	67,1	65,6	64,4
2.	Kepuasan terhadap tunjangan profesi dari dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi	50,8	60,7	58,1	50,0	54,9
	Rata-Rata Total	56,3	62,0	62,6	57,8	

- Persyaratan dan prosedur pengusulan guru bukan PNS untuk mendapatkan tunjangan profesi dari dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi dinilai para pendidik lebih baik dibanding tunjangan yang diperolehnya.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Responden adalah Pendidik SD-SMA yang mengetahui tunjangan profesi guru Non PNS

Akreditasi Lembaga Pendidikan

Kepuasan Terhadap Akreditasi Sekolah



Responden adalah peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan yang mengetahui akreditasi oleh Kantor Dinas Pendidikan di sekolahnya.

No.	Prosedur Akreditasi Lembaga	Skor
1.	Layanan adminitrasi pengajuan perizinan/akreditasi	62,7
2.	Prosedur penilaian oleh Asesor	62,4
3.	Layanan informasi prosedur, biaya, lama layanan, dan lainnya	60,9
4.	Kecepatan layanan hingga perolehan izin/akreditasi	57,2
Rata-Rata Total		60,8

Responden adalah Pengelola Pendidikan yang mengetahui proses dan prosedur akreditasi lembaga pendidikan di Kantor Dinas setempat

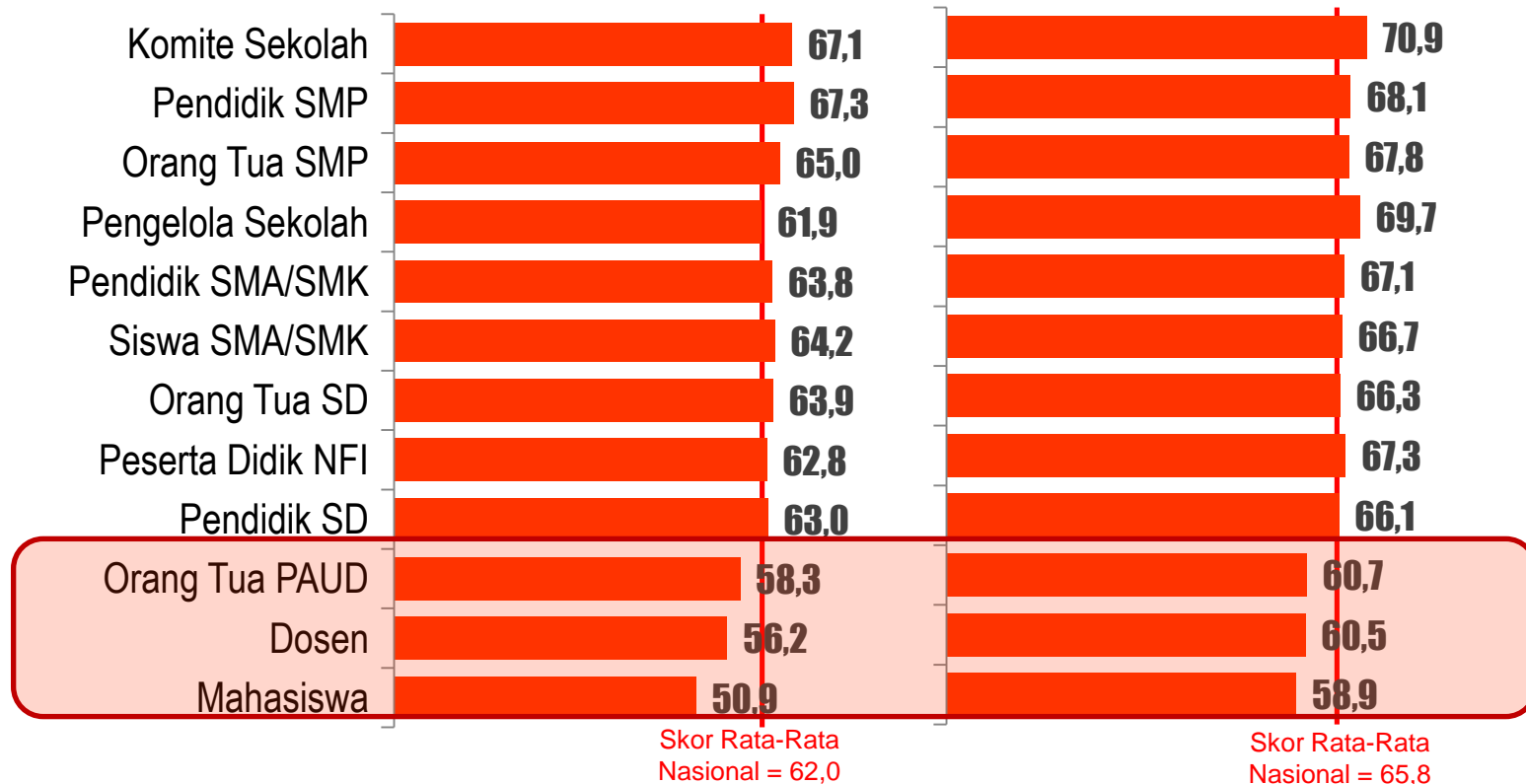
- Pengelola satuan pendidikan lebih merasakan kepuasan dibanding pendidik dan peserta didik dalam hal akreditasi sekolah.
- Namun prosedur akreditasi lembaga pendidikan dinilai pengelola masih belum optimal, khususnya dalam proses layanan memperoleh izin atau akreditasi.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100). Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Reformasi Birokrasi Kemdiknas

Tingkat Kepuasan Terhadap Reformasi Birokrasi

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Misi Kemdiknas



- Mahasiswa, dosen, dan orang tua PAUD merupakan stakeholder primer yang menilai reformasi birokrasi di Kemdiknas belum berjalan optimal.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

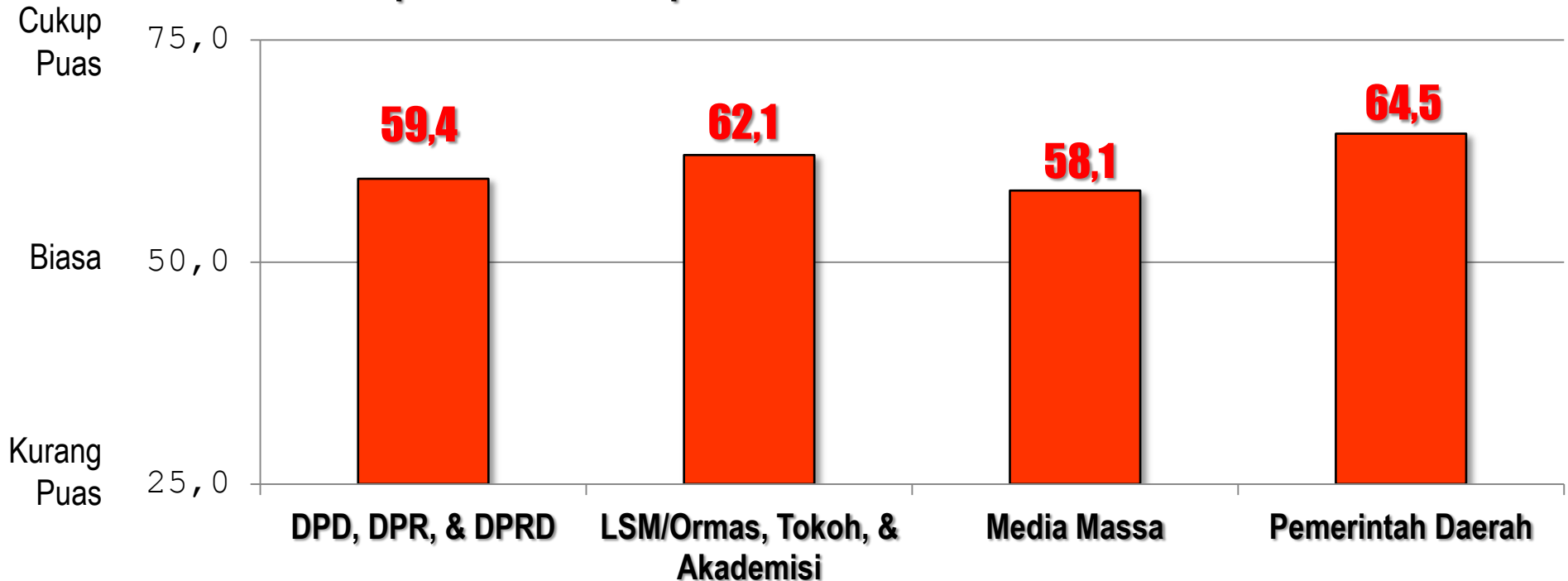
Total Responden di 33 Provinsi (N= 6.950)

BAGIAN 3

KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEMDIKNAS KATEGORI SEKUNDER

Sarana dan Prasarana Sekolah

Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana Sekolah

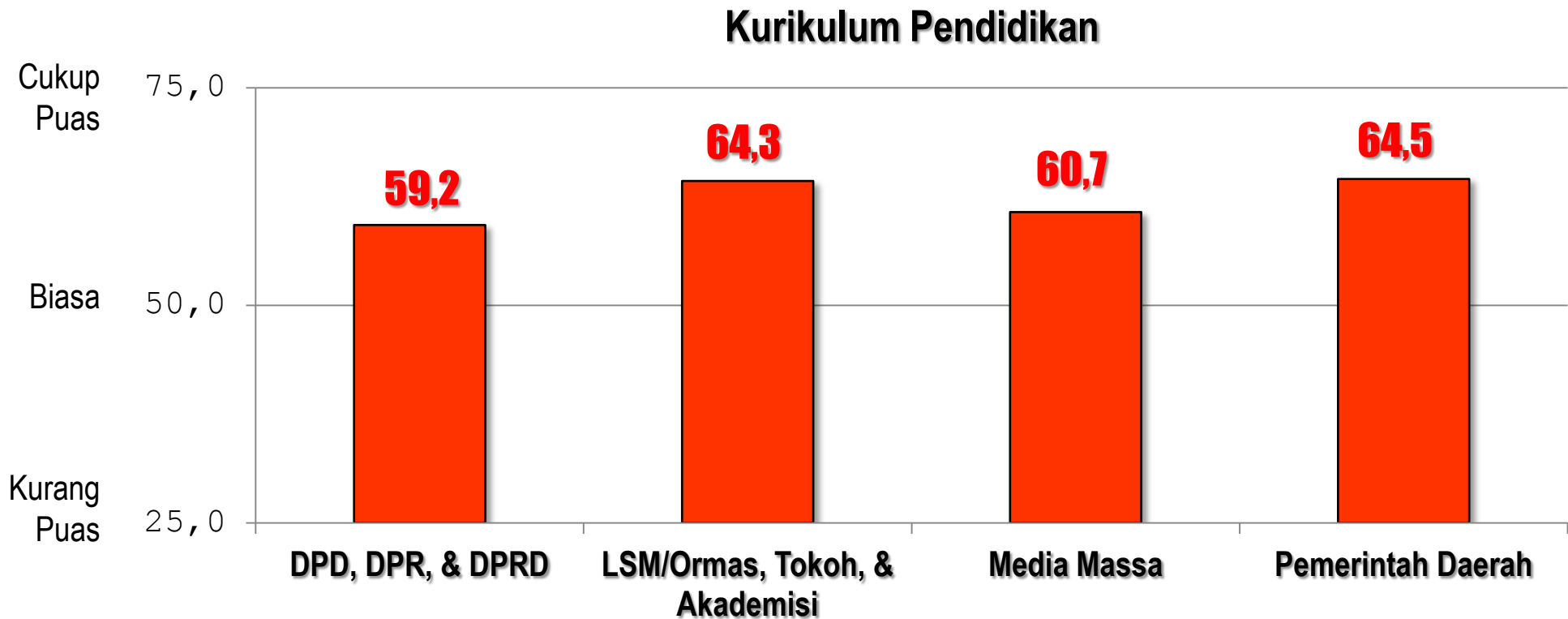


- Kepuasan terhadap sarana dan prasarana, pemangku kepentingan kategori sekunder khususnya kelompok media massa cenderung kritis dengan lebih menundjukkan ketidakpuasannya. Sementara kelompok Pemerintah Daerah lebih tinggi dibanding kelompok lain dalam menilai kepuasan terhadap aspek sarana dan prasana sekolah.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Kurikulum Pendidikan

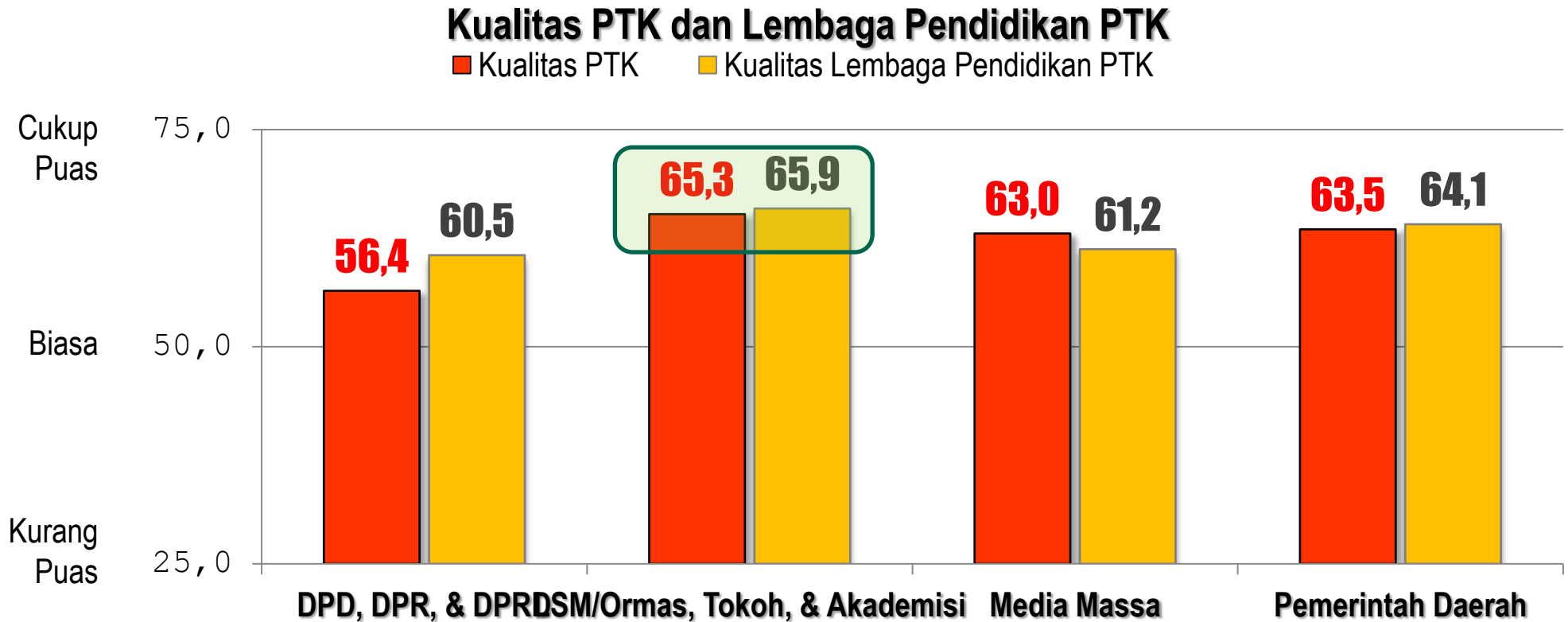


- Kepuasan terhadap kurikulum pendidikan, pemangku kepentingan kategori sekunder khususnya kelompok Pemerintah Daerah dan LSM/Ormas cukup tinggi dalam menilai kepuasan dibanding kelompok lain.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Kualitas PTK dan Lembaga Pendidikan PTK



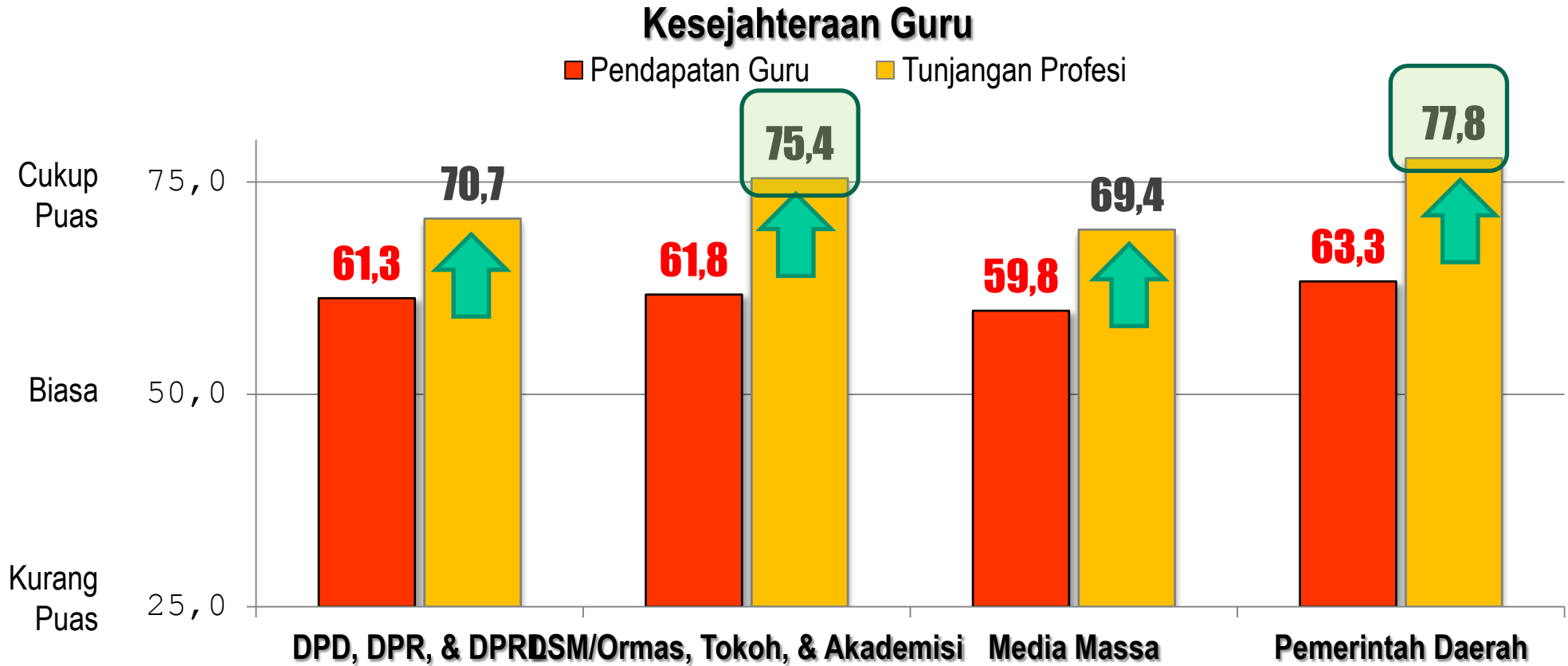
- Kepuasan terhadap kualitas pendidik dan kualitas lembaga kependidikan lebih diapresiasi kelompok LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dan akademisi dalam menilai kepuasan dibanding kelompok lain.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Kesejahteraan Guru



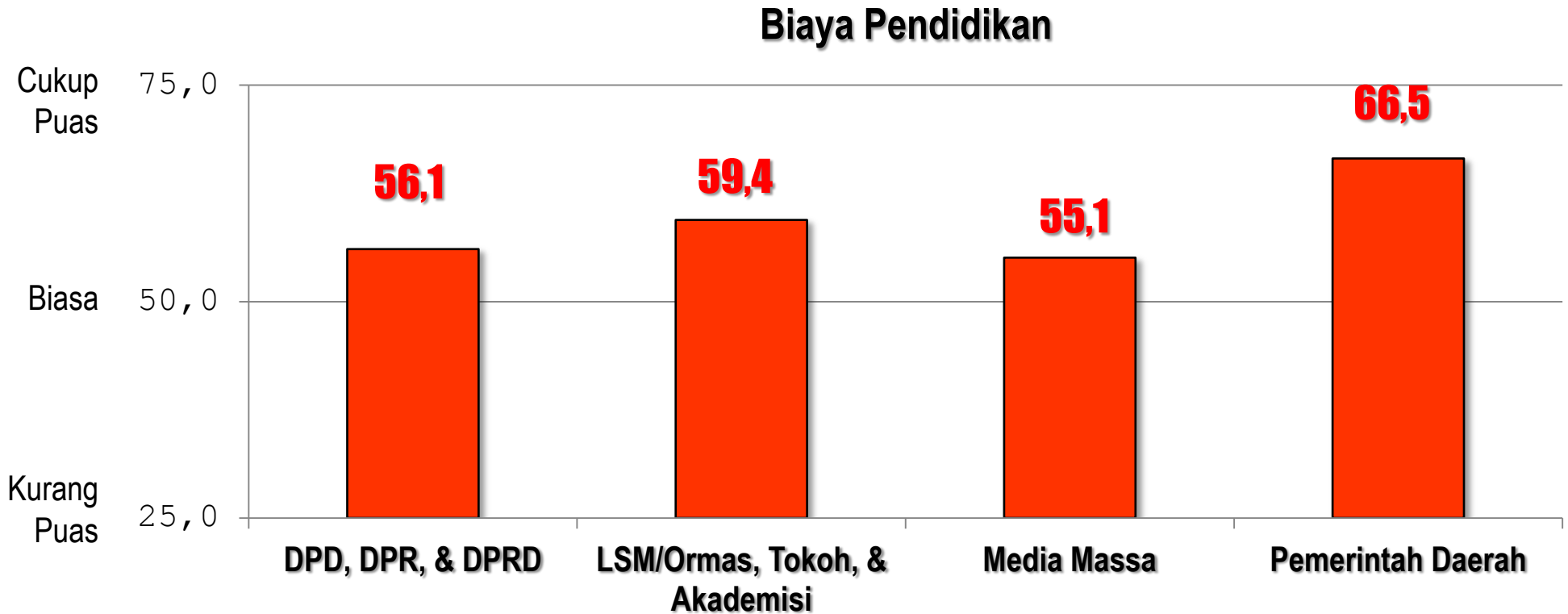
- Para pemangku kepentingan kategori sekunder menilai kebijakan pemberian tunjangan profesi guru sangat positif, bahkan kelompok Pemda dan LSM/Ormas menilainya “Memuaskan”.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Biaya Pendidikan

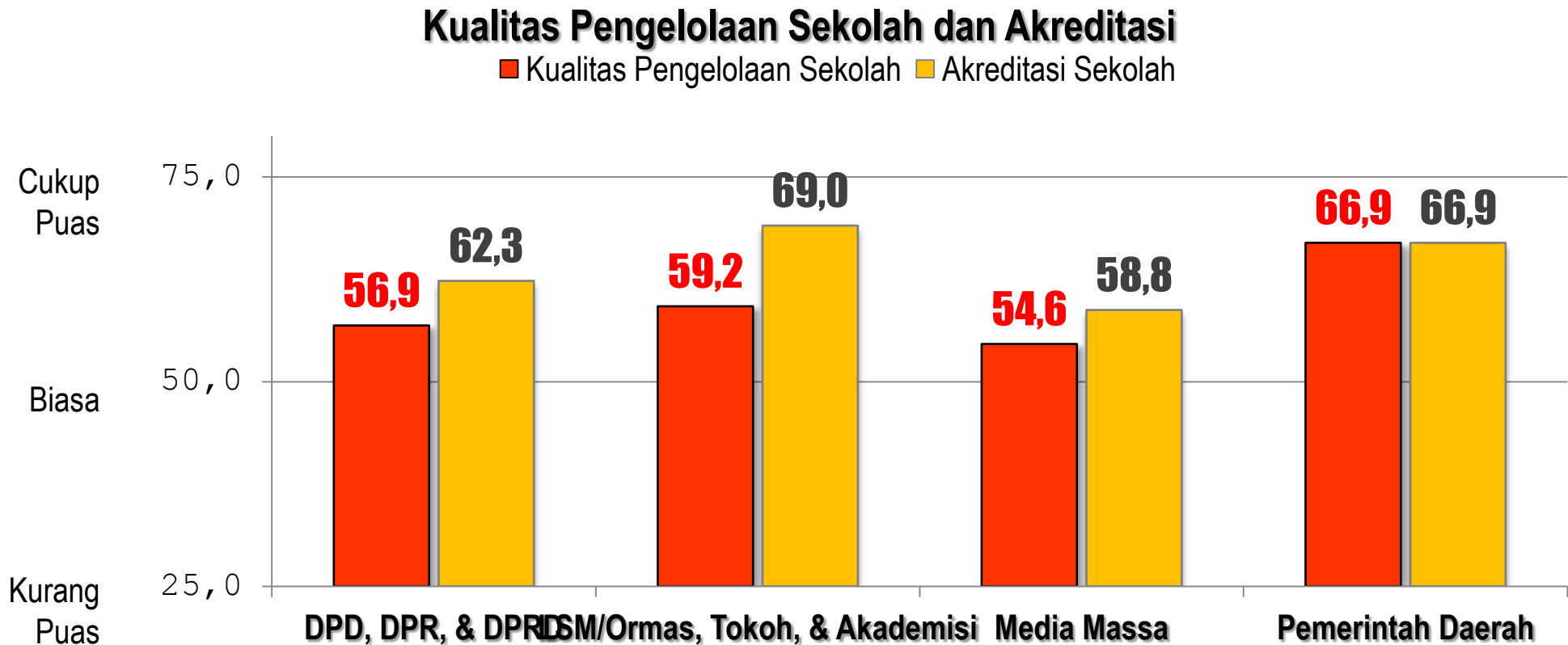


- Kepuasan terhadap biaya pendidikan, pemangku kepentingan kategori sekunder khususnya kelompok Pemerintah Daerah cukup tinggi dalam menilai kepuasan dibanding kelompok lain. Namun skor belum mencapai angka 75,0 yang mengindikasikan *stakeholder* merasa puas.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Kualitas Pengelolaan Sekolah dan Akreditasi

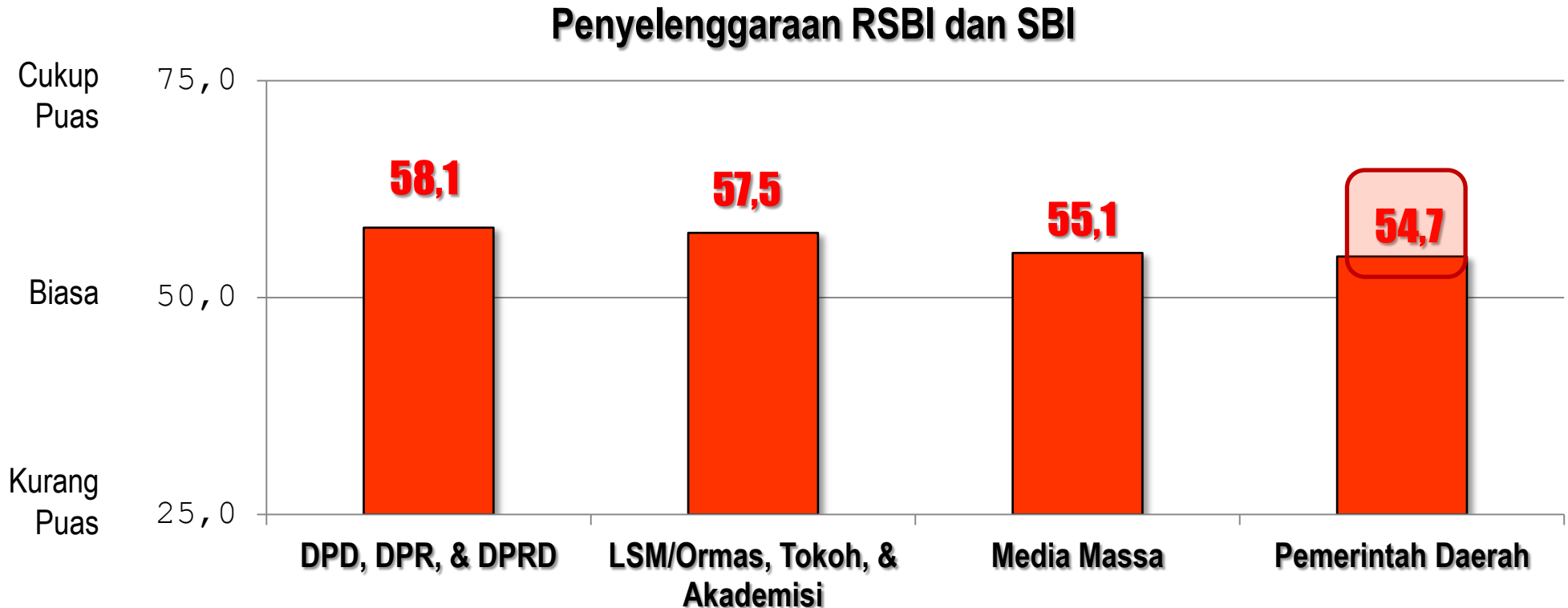


- Penilaian *stakeholder* sekunder terhadap kualitas manajemen pengelolaan sekolah masih belum optimal. Namun akreditasi yang dilakukan Kemdiknas/Kantor Dinas yang juga bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, dinilai lebih memuaskan.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Penyelenggaraan RSBI dan SBI

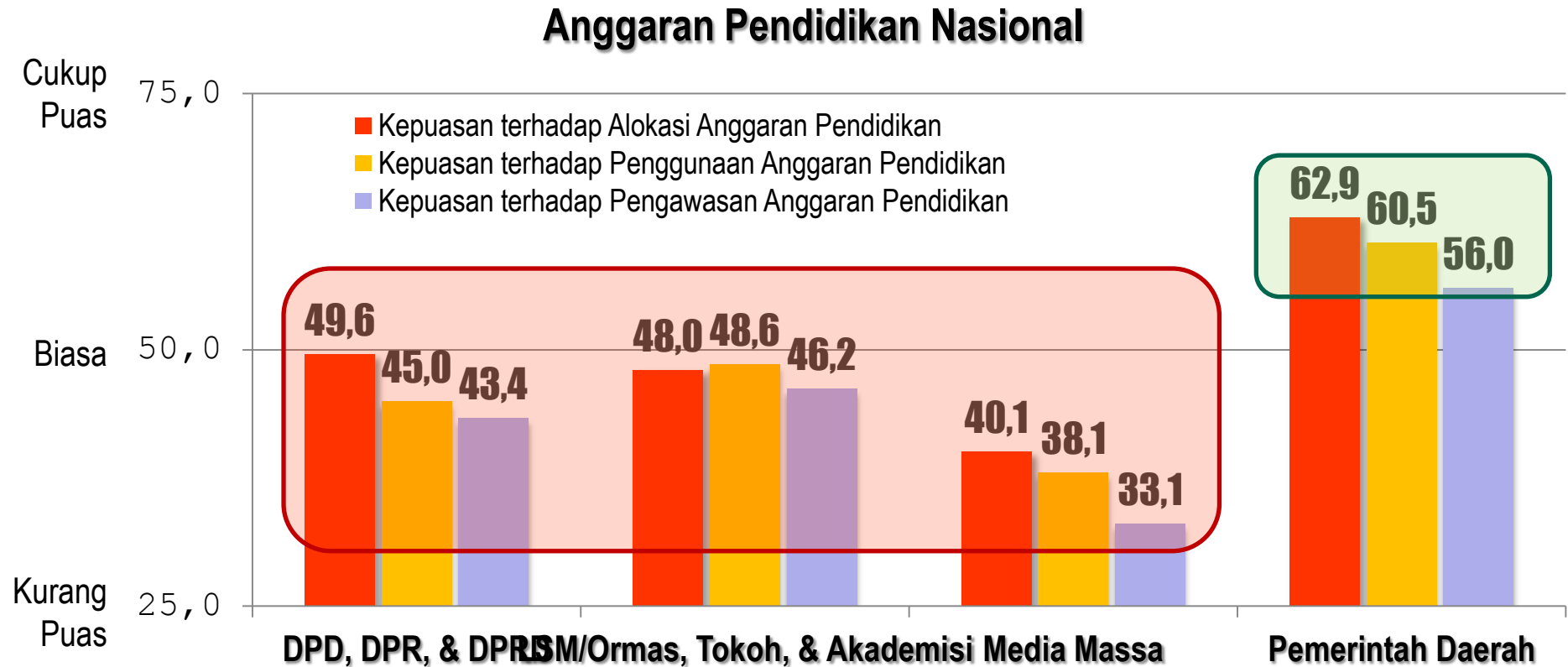


- Penyelenggaraan RSBI atau SBI yang melibatkan Pemerintah Daerah ternyata dinilai oleh responden Pemerintah Daerah kurang memuaskan, lebih rendah dibanding legislatif, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, akaedmisi, dan media massa.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Anggaran Pendidikan Nasional

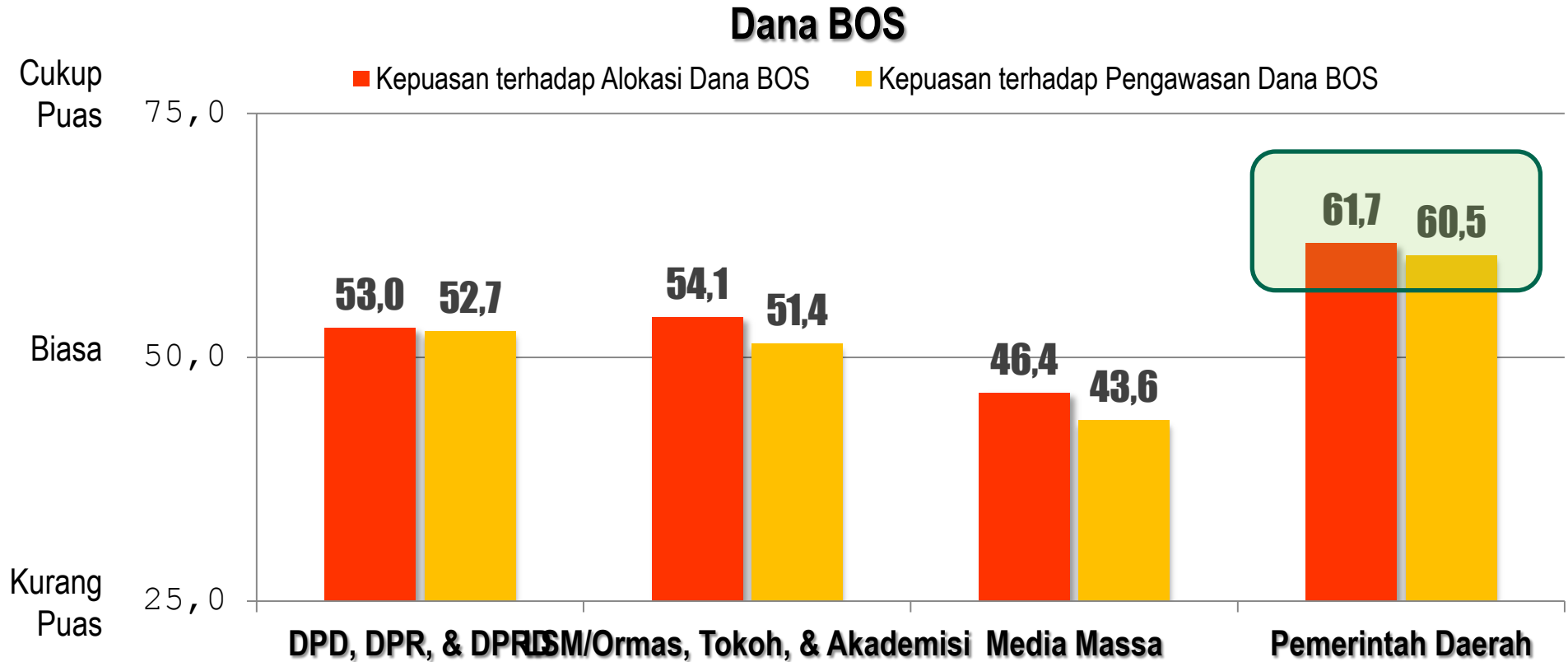


- Meski anggaran pendidikan nasional mendapatkan porsi yang sangat besar dalam APBN, namun persepsi dari *stakeholder* sekunder, kecuali kelompok Pemerintah Daerah, itu rendah dan cenderung menilai kurang memuaskan.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



- Meski alokasi dana BOS mendapatkan porsi yang cukup besar dalam anggaran pendidikan nasional, namun persepsi dari *stakeholder* sekunder, kecuali kelompok Pemerintah Daerah, itu rendah dan cenderung menilai kurang memuaskan.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Ketersediaan Buku Teks

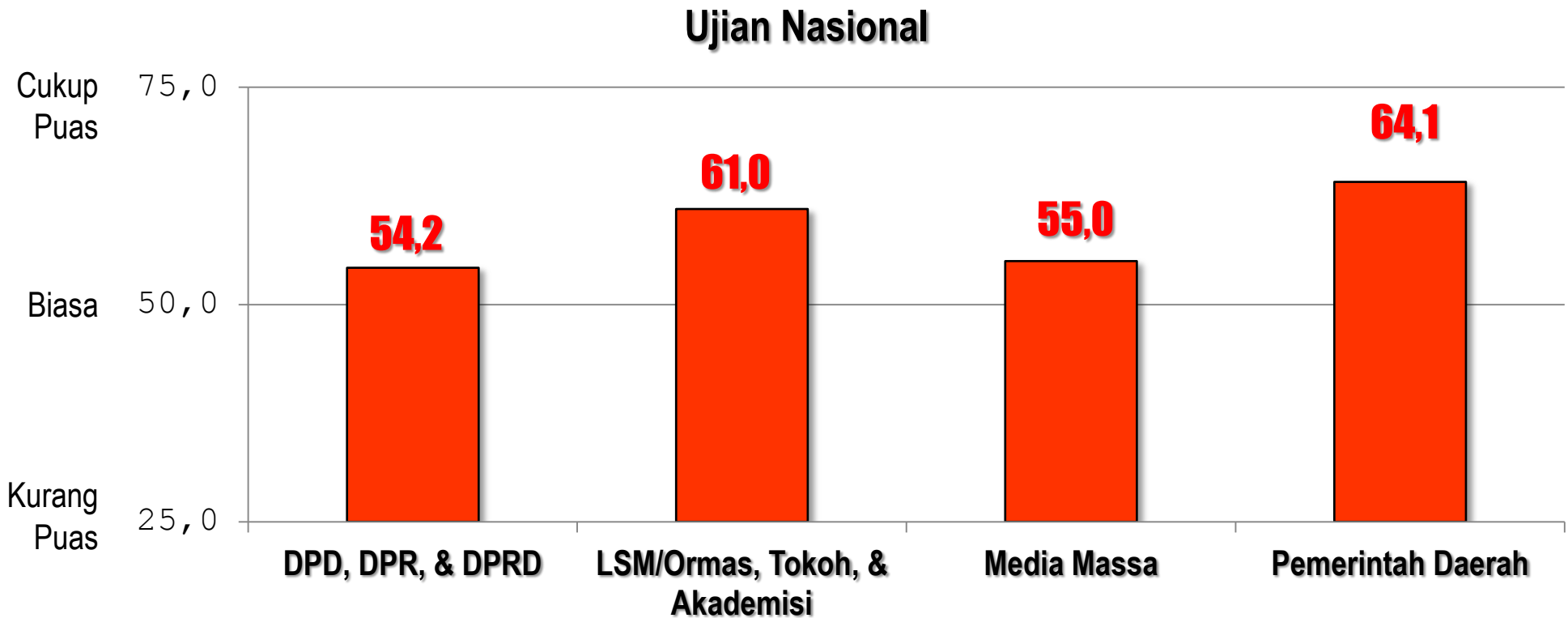
No.	Aspek Ketersediaan Buku Teks	DPD, DPR, & DPRD	LSM/Ormas, Tokoh, Aka demisi	Media Massa	Pemerintah Daerah	Total
1.	Kesesuaian materi teks pelajaran dgn kurikulum yang diajarkan	63,7	67,9	61,0	71,4	66,0
2.	Ketersediaan buku teks pelajaran di toko/di pasaran	62,1	68,5	58,2	69,4	64,5
3.	Kualitas buku teks pelajaran bagi siswa	63,7	65,0	60,6	66,1	63,9
4.	Bantuan Kemdiknas/Kantor Dinas Pendidikan dalam penyediaan buku teks pelajaran ke sekolah	55,2	57,2	61,4	59,0	58,2
5.	Buku teks dapat dipergunakan secara berulang (buku tahun ini dapat digunakan untuk tahun depan)	48,4	49,7	48,8	49,2	49,0
6.	Harga buku teks pelajaran yang terjangkau (cukup murah)	45,7	53,7	46,6	49,6	48,9
Rata-Rata Total		56,5	60,3	56,1	60,8	

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

ANALISA PER ASPEK PENILAIAN

Ujian Nasional



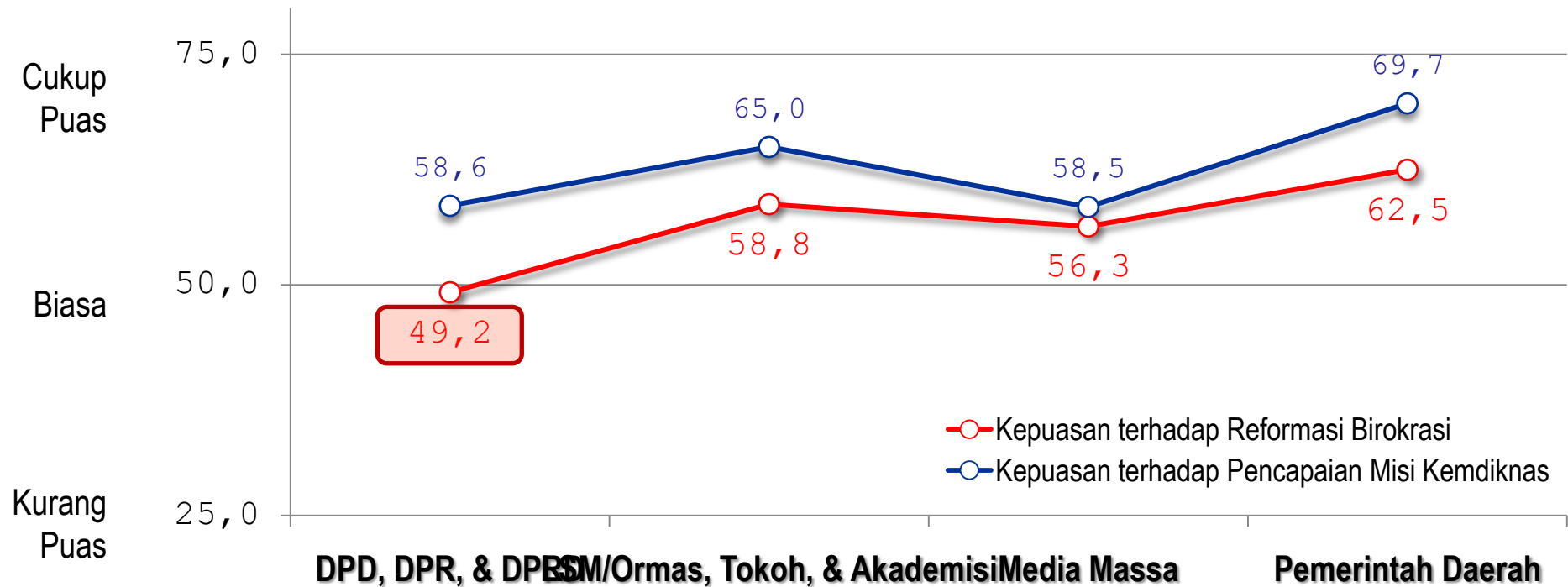
- Penilaian *stakeholder* sekunder terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) masih belum optimal. Skor indeks kepuasan responden dari Pemerintah Daerah sedikit lebih tinggi dibanding kelompok responden lainnya.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Kemdiknas

Reformasi dan Birokrasi dan Tata Kelola Kemdiknas



- Penilaian *stakeholder* sekunder terhadap reformasi birokrasi di Kemdiknas masih belum optimal, termasuk pencapaian misi Kemdiknas. Skor indeks kepuasan responden dari Pemerintah Daerah sedikit lebih tinggi dibanding kelompok responden lainnya.

Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100).
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden.

Total Responden di 33 Provinsi (N= 462)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- Kepuasan dan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan Kemdiknas berasal dari persepsi para pemangku kepentingan tersebut dalam menilai kinerja dan program yang telah dijalankan. Persepsi berasal dari pengamatan, pengalaman, dan terpaan informasi yang diterima.
- Sehingga untuk meningkat indeks kepuasan pamangku kepentingan Kemdiknas ini perlu penekanan pada optimalisasi berjalannya program dan kebijakan, serta diseminasi informasi program Kemdiknas
- Survei kepuasan pemangku kepentingan perlu disinergikan dengan program dan kebijakan yang sudah disusun secara sistematis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas, khususnya dalam penentuan prioritas berdasarkan perspektif pemangku kepentingan.

Kesimpulan (1)

Kesimpulan	Temuan Hasil Survei	Rekomendasi
Kepuasan pemangku kepentingan Kemdiknas masih belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan Kategori Primer masuk penilaian “Biasa” (=Skor 68,4). 2. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan Kategori Sekunder masuk penilaian “Biasa” (=Skor 59,9) masih berada di bawah penilaian “Memuaskan” yakni skor indeks lebih dari 75,0. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kinerja layanan untuk pencapaian layanan yang unggul melalui layanan prima. 2. Layanan Kemdiknas yang berorientasi pada kepuasan para pemangku kepentingan, perlu memperhatikan dan kepuasan para pemangku kepentingan. 3. Perlu dilakukan evaluasi berkesinambungan dan Kemdiknas terus memonitor perkembangan/ kemajuan yang dicapai. Bagi yang nilai indeksnya turun atau rendah perlu diberikan perhatian lebih.

Kesimpulan (2)

Kesimpulan	Temuan Hasil Survei	Rekomendasi
Terdapat perbedaan penilaian Stakeholder Primer dan Sekunder dalam beberapa aspek penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parameter dari <i>Stakeholder</i> Primer yang paling berpengaruh adalah Kurikulum dan Kualitas Lembaga Kependidikan PTK (berada di atas rata-rata), lalu Sarana & Prasarana Sekolah (di bawah rata-rata). 2. Parameter dari <i>Stakeholder</i> Sekunder yang paling berpengaruh adalah Anggaran Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (berada di bawah rata-rata), lalu Sarana & Prasarana Sekolah (di atas rata-rata). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkat kepuasan dari <i>Stakeholder</i> Primer perlu meningkatkan kualitas Sarana & Prasarana Sekolah. Program rehabilitasi sekolah rusak yang sudah berjalan dapat menjadi program unggulan untuk peningkatan kepuasan khususnya <i>Stakeholder</i> Primer. 2. Untuk meningkat kepuasan dari <i>Stakeholder</i> Sekunder perlu memperhatikan isu terkait anggaran pendidikan dan reformasi birokrasi.

Kesimpulan (3)

Kesimpulan	Temuan Hasil Survei	Rekomendasi
Isu pemangku kepentingan kategori primer berbeda dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan kategori Primer cenderung mencermati isu yang terkait dengan kualitas program pendidikan (kurikulum, lembaga kependidikan, dsb.) dan sarana & prasarana sekolah. 2. Pemangku kepentingan kategori Sekunder cenderung mencermati isu yang terkait politis seperti anggaran pendidikan dan reformasi birokrasi di Kemdiknas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan primer difokuskan pada informasi program dan kebijakan Kemdiknas di bidang peningkatan kualitas pendidikan. 2. Prioritas diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan sekunder difokuskan pada informasi politis terkait anggaran pendidikan dan reformasi birokrasi di Kemdiknas. 3. Khusus kategori media massa, perlu jalinan kerja sama dan komunikasi yang baik, di Jakarta maupun daerah, untuk peningkatan pemberitaan yang berimbang.

Kesimpulan (4)

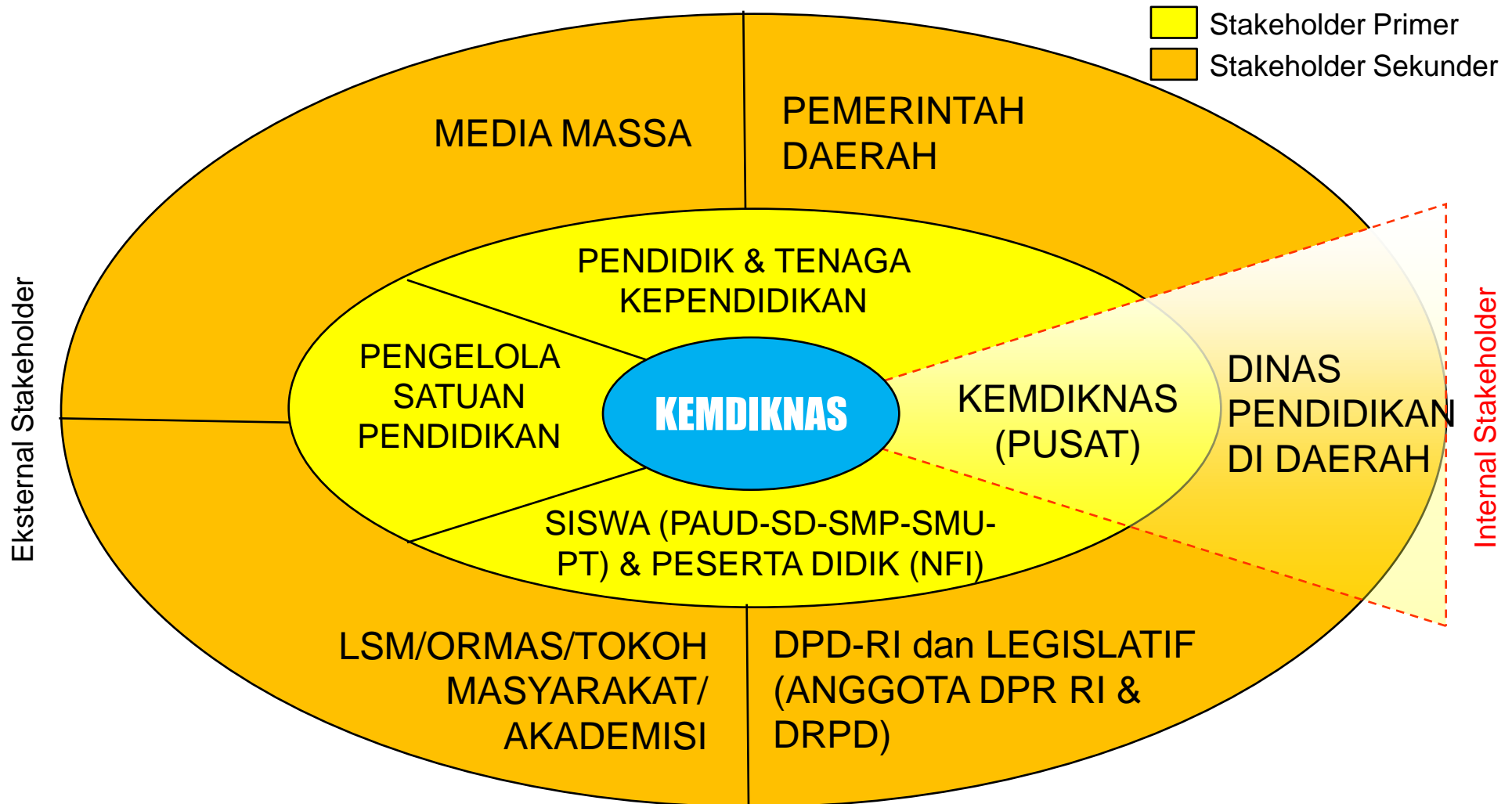
Kesimpulan	Temuan Hasil Survei	Rekomendasi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan jumlah sekolah PAUD berada pada posisi terendah kepuasan <i>stakeholder</i> primer. 2. Kurikulum PAUD dinilai telah cukup memuaskan <i>stakeholder</i> primer dalam hal mendidik moral & akhlak dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Kualitas pendidik dan lembaga kependidikan PAUD berada pada posisi kepuasan terendah. 4. Kesejahteraan pendidik PAUD berada pada posisi kepuasan terendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program unggulan Kemdiknas yang akan digulirkan pada tahun yang akan datang perlu memperhatikan aspek yang menjadi perhatian (kepuasan) <i>stakeholder</i> primer yakni khususnya pada jumlah sekolah, kualitas pendidik dan lembaga kependidikan PAUD, dan kesejahteraan pendidiknya.

Kesimpulan (5)

Kesimpulan	Temuan Hasil Survei	Rekomendasi
Pendidikan Kejuruan (SMK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana SMK berada pada posisi tertinggi kepuasan <i>stakeholder</i> primer. 2. Kurikulum SMK dinilai telah cukup memuaskan <i>stakeholder</i> primer khususnya dalam hal orientasi kurikulum ke dunia kerja. 3. Kualitas pendidik dan lembaga kependidikan SMK berada pada posisi kepuasan tertinggi. 4. Kesejahteraan pendidik PAUD berada pada posisi kepuasan cukup tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program dan kebijakan sekolah kejuruan diapresiasi positif oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). Hal yang perlu diperhatikan tentunya adalah mempertahankan dan meningkatkan hingga mencapai angka skor Memuaskan (>75,0).

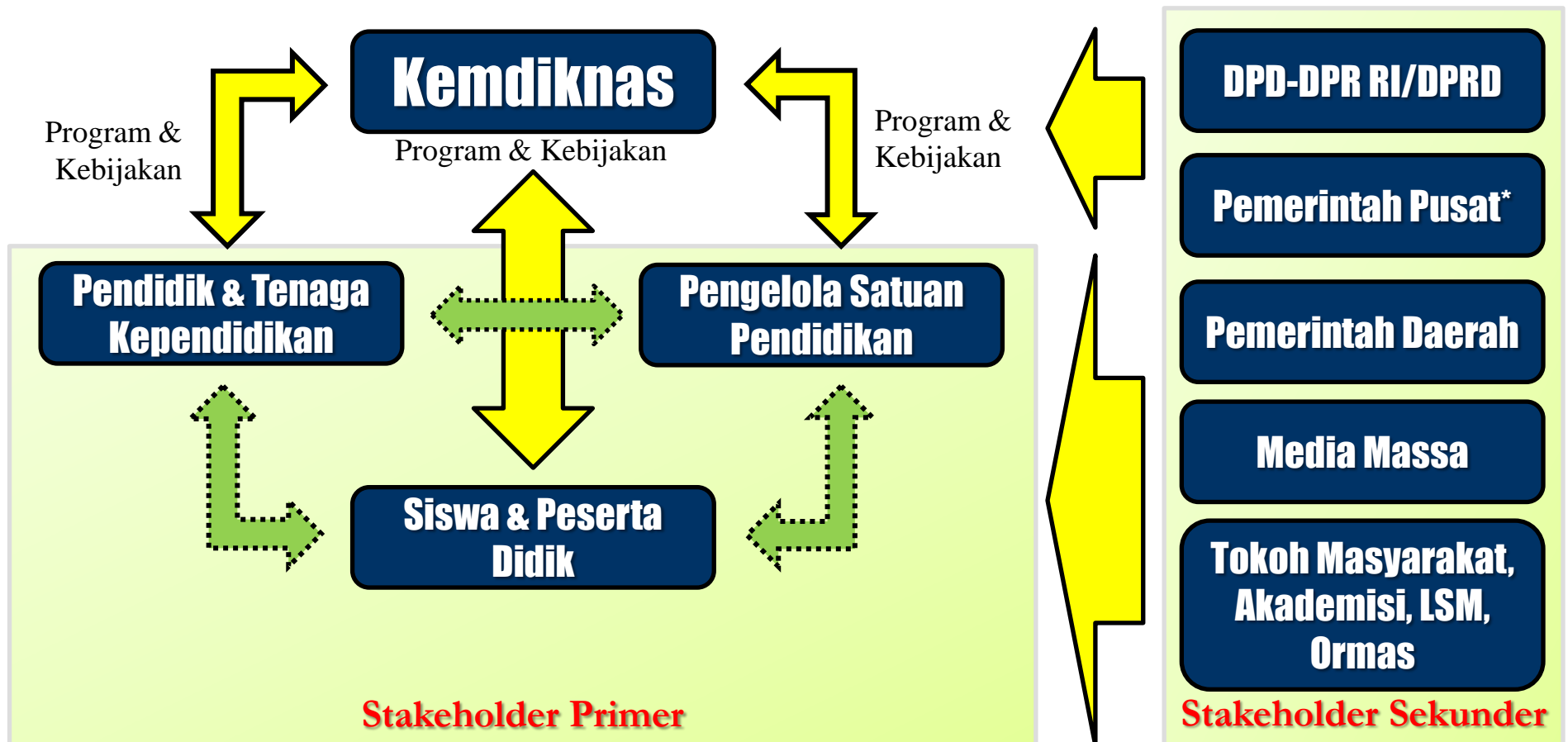
LAMPIRAN

“Stakeholder” Kemdiknas



Modifikasi Diagram: Freeman, Harrison, & Wicks, “Managing for Stakeholders”, 2007

Model “Stakeholder Satisfaction” Kemdiknas



Hubungan Kemdiknas dengan Stakeholder (Primer & Sekunder) yang dievaluasi dalam survei.

*Khusus Pemerintah Pusat tidak dilakukan karena masuk koordinasi antar (internal) Kementerian.

Kategori Responden – Stakeholder Primer

No.	Stakeholder Primer	Kategori Responden
1.	Peserta Didik	- Siswa PAUD diwakili Orang Tua
		- Siswa Dasar (SD & SMP) diwakili Orang Tua
		- Siswa SMU/SMK kelas 3 (Negeri & Swasta)
		- Mahasiswa (Diploma/Sarjana)
		- Peserta Pendidikan Non Formal/Informal (Dewasa)
		- Komite Sekolah (Orang Tua Siswa SD-SMA)
2.	Pendidikan & Tenaga Kependidikan	- Guru/Kepsek PAUD
		- Guru/Kepsek SD (Negeri & Swasta)
		- Guru/Kepsek SMP (Negeri & Swasta)
		- Guru/Kepsek SMU/SMK (Negeri & Swasta)
		- Dosen (Negeri & Swasta)
3.	Pengelola Satuan Pendidikan	- Pengelola Lembaga Pendidikan (Pengurus: Yayasan, PAUD, Lembaga Pendidikan Non Formal & Informal)

Kategori Responden – Stakeholder Sekunder

No.	Stakeholder Sekunder	Kategori Responden
1.	DPD-RI, DPR-RI, & DPRD	- Anggota DPD RI
		- Anggota DPR RI (Komisi Pendidikan)
		- Anggota DPRD Provinsi (Komisi Pendidikan)
		- Anggota DPRD Kota/Kab. (Komisi Pendidikan)
2.	Pemerintah Daerah	- Sekretaris Daerah/Biro yang wewenang mengalokasi anggaran pendidikan
3.	Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, & Akademisi	- Tokoh masyarakat yang aktif di dunia pendidikan
		- Akademisi di bidang kebijakan pendidikan
		- LSM yang fokus di bidang pendidikan masyarakat
		- Ormas yang memiliki program pendidikan
4.	Media Massa	- Pemred/Redaktur yang membawahi pemberitaan nasional dan kependidikan

Parameter Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (1)

VISI & MISI KEMDIKNAS 2010 – 2014

RENCANA STRATEGIS KEMDIKNAS 2010 – 2014

**STRATEGI UTAMA
KEMDIKNAS**

**PROGRAM UNIT UTAMA/UPT
YANG MENJADI ISU/BERITA**

Pembatasan parameter (kebijakan dan program utama kementerian atau program unit kerja Kemdiknas)
berdasarkan prioritas, kecukupan informasi, dan keterbatasan teknis survei

PROGRAM/KEBIJAKAN KEMDIKNAS YANG MENJADI PARAMETER

Parameter → Topik Kuesioner & Kategori Stakeholder → Pertanyaan Pada Kuesioner

**Kepuasan “Stakeholder” → Indeks Kepuasan Per Kategori: Topik (Kebijakan/Program),
Stakeholder, Wilayah, maupun Total Keseluruhan (Kementerian)**

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014
 “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 - 2014 (MISI 5K)

Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan
 Memperluas **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
 Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan
 Mewujudkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
 Menjamin **Kepastian** Memperoleh Layanan Pendidikan

“Melayani Semua dengan Amanah”

TUJUAN STRATEGIS	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Berkualitas	Tersedia, terjangkau, dan Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan	Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Handal
------------------	---	---	---	--	--	--

STRATEGI	★ Peningkatan Kompetensi Pendidik	★ Penguatan Manajemen Satuan Pendidikan	★ Penyempurnaan Sistem Pembelajaran	★ Penyediaan Sarana Dan Prasarana	★ Subsidi Untuk Pendidikan Formal	★ Subsidi PNFI
	★ Data & Informasi Serta Akreditasi Pendidikan	★ Penataan Struktur Organisasi	★ Penguatan Akuntabilitas	★ Pengelolaan Aset BMN	★ Penguatan Sistem Pengawasan	

ARAH KEBUJUKAN	PENINGKATAN MUTU LPTK & LULUSANNYA	SERTIFIKASI & KUALIFIKASI GURU	PENINGKATAN MUTU KEPSEK & PENGAWAS SEKOLAH	PENERAPAN METODOLOGI PENDAKHLAK MULIA AKAR AKTER BANGSA	PENGEMBANGAN METODOLOGI PEND. YG MEMBANGUN MANUSIA BERJULUK KREATIF, INOVATIF, SPORTIF & WIRALSAHA	KETERPADUAN SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN	PENGUATAN & PERLUASAN PEMANFAATAN TK	PENYEDIAAN BUKU TEKS MURAH	RASIONALISASI PENDANAAN PENDIDIKAN, PENGLITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	PENGUATAN DAN PERLUASAN PNFI	REFORMASI BOKRASI	KOORDINASI ANTAR KLASERTAPUSAT & DAERAH	AKSELERASI PENANGGULANGAN PEND. DI DAERAH PERBATASAN, TERTINGGAL & BENCANA	PENYELARASAN PENDIDIKAN DENGAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
----------------	------------------------------------	--------------------------------	--	---	--	--	--------------------------------------	----------------------------	---	---	------------------------------	-------------------	---	--	---

PROGRAM	TK & DIKDAS	DIKMEN	DIKTI	MUTU & KESEJAHTERAAN PTK	PNFI
		MANAJEMEN	PENELITIAN & PENGEMBANGAN	PENGAWASAN	

METODOLOGI PENELITIAN

Parameter Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (1)

No.	Parameter Indeks Kepuasan	KATEGORI PRIMER											
		[Orang Tua] Siswa PAUD	Peserta Didik NFI	Orang Tua [Siswa] SD	Orang Tua [Siswa] SMP	Siswa SMU/ SMK	Maha-siswa	Guru/ Kepsek SD	Guru/ Kepsek SMP	Guru SMA/ SMK	Komite Sekolah	Dosen	Pengurus Yayasan
1	Sarana dan prasarana sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kurikulum pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kualitas tenaga pendidik & kependidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kualitas lembaga kependidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Kesejahteraan pendidik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kualitas manajemen pengelolaan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Akreditasi sekolah oleh Kemdiknas/Kantor Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Biaya pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Anggaran pendidikan nasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Penyelenggaraan RSBI/SBI			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
11	Dana BOS			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
12	Beasiswa & subsidi siswa miskin			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Buku teks pendidikan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Sistem penilaian & evaluasi pendidikan		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
15	Ujian Nasional (UN)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
16	Penelitian & pengabdian kepada masyarakat						✓	✓	✓	✓		✓	
17	Sertifikasi guru							✓	✓	✓			✓
18	Tunjangan profesi guru Non PNS							✓	✓	✓			✓
19	Prosedur akreditasi lembaga pendidikan												✓
20	Reformasi birokrasi Kemdiknas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

METODOLOGI PENELITIAN

Parameter Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (2)

No.	Parameter Indeks Kepuasan	KATEGORI SEKUNDER			
		DPD, DPR, dan DPRD	Pemerintah Daerah	Media Massa	LSM/Ormas, Tokoh, dan Akademisi
1	Sarana dan prasarana sekolah	✓	✓	✓	✓
2	Kurikulum pendidikan	✓	✓	✓	✓
3	Kualitas tenaga pendidik & kependidikan	✓	✓	✓	✓
4	Kualitas lembaga kependidikan	✓	✓	✓	✓
5	Kesejahteraan dan tunjangan profesi guru	✓	✓	✓	✓
6	Kualitas manajemen pengelolaan pendidikan	✓	✓	✓	✓
7	Akreditasi sekolah oleh Kemdiknas/Kantor Dinas	✓	✓	✓	✓
8	Biaya pendidikan	✓	✓	✓	✓
9	Anggaran pendidikan nasional	✓	✓	✓	✓
10	Penyelenggaraan RSBI/SBI	✓	✓	✓	✓
11	Dana BOS	✓	✓	✓	✓
12	Beasiswa & subsidi siswa miskin	✓	✓	✓	✓
13	Buku teks pendidikan	✓	✓	✓	✓
14	Ujian Nasional (UN)	✓	✓	✓	✓
15	Reformasi birokrasi Kemdiknas	✓	✓	✓	✓

Metode Pengukuran Tingkat Kepuasan

- ## Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdiknas 2011

Responden Per Kategori

- Jumlah responden untuk “Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan” ini adalah sebanyak **7.410 responden** total kategori primer dan sekunder, dengan estimasi *sampling error* sebesar $\pm 1,14\%$, pada interval kepercayaan 95,0%.
- Sampling diambil acak sesuai komposisi responden, *multistage random sampling*, dengan memperhatikan pembagian jenis kelamin (pria:wanita, 50:50) dan wilayah (urban:rural) agar tingkat keterwakilan nasional terpenuhi.
- Komposisi responden lengkap dirinci pada lembar lampiran.

Provinsi	Primer	Sekunder	Total	%Total
Nangroe Aceh Darussalam	150	10	160	2,16%
Sumatera Utara	400	25	425	5,74%
Sumatera Barat	200	15	215	2,90%
Riau	200	15	215	2,90%
Jambi	150	10	160	2,16%
Sumatera Selatan	300	15	315	4,25%
Bengkulu	150	10	160	2,16%
Lampung	150	10	160	2,16%
Kep. Bangka Belitung	150	10	160	2,16%
Kepulauan Riau	150	10	160	2,16%
DKI Jakarta	400	30	430	5,80%
Jawa Barat	400	30	430	5,80%
Jawa Tengah	400	25	425	5,74%
DI Yogyakarta	150	10	160	2,16%
Jawa Timur	400	25	425	5,74%
Banten	400	25	425	5,74%
Bali	150	10	160	2,16%
Nusa Tenggara Barat	150	10	160	2,16%
Nusa Tenggara Timur	150	10	160	2,16%
Kalimantan Barat	150	10	160	2,16%
Kalimantan Tengah	150	10	160	2,16%
Kalimantan Selatan	150	10	160	2,16%
Kalimantan Timur	150	10	160	2,16%
Sulawesi Utara	150	10	160	2,16%
Sulawesi Tengah	150	10	160	2,16%
Sulawesi Selatan	400	25	425	5,74%
Sulawesi Tenggara	150	10	160	2,16%
Gorontalo	150	10	160	2,16%
Sulawesi Barat	150	10	160	2,16%
Maluku	150	10	160	2,16%
Maluku Utara	150	10	160	2,16%
Papua Barat	150	10	160	2,16%
Papua	150	10	160	2,16%
Total	6.950	460	7.410	100%

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

